



# Konsep dan Praksis **PENDIDIKAN** MULTIKULTURAL

Taat Wulandari

Konsep dan Praksis  
**PENDIDIKAN  
MULTIKULTURAL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 2**

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

**BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 112**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Konsep dan Praksis  
**PENDIDIKAN  
MULTIKULTURAL**

Taat Wulandari



**Konsep dan Praksis Pendidikan Multikultural**

Oleh:

Taat Wulandari

**Penyunting Bahasa:**

Shendy Amalia

ISBN: 978-602-498-132-7

©2020 Taat Wulandari

Edisi Pertama

**Diterbitkan dan dicetak oleh:**

**UNY Press**

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274-589346

Mail: [unypress.yogyakarta@gmail.com](mailto:unypress.yogyakarta@gmail.com)

*Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)*

*Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)*

Desain Sampul: Ngadimin

Tata Letak: Arief Mizuary

# DAFTAR ISI

---

DAFTAR ISI .....	v
PRAKATA .....	vii
BAB I    PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .....	1
A.    Konsep dan Tujuan Pendidikan.....	1
B.    Kebudayaan .....	10
C.    Pendidikan dan Kebudayaan .....	15
BAB II    PENDIDIKAN MULTIKULTURAL .....	21
A.    Konsep Pendidikan Multikultural.....	21
B.    Tujuan Pendidikan Multikultural.....	24
C.    Dimensi Pendidikan Multikultural .....	28
D.    Sejarah Munculnya Pendidikan Multikultural .....	33
BAB III    FILSAFAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL .....	37
BAB IV    TEORI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL .....	41
A.    Pendidikan Multikultural Sebagai Pendidikan Kritis.....	45
B.    Pendidikan Multikultural Sebagai Aspek Politik .....	46
C.    Pendidikan Multikultural Sebagai Aspek Sosial.....	48
D.    Pendidikan Multikultural Sebagai Aspek Budaya.....	50
BAB V    EMPIRIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL .....	53
A.    Pendidikan Multikultural di Beberapa Negara.....	54
B.    Pendidikan Multikultural di Indonesia .....	56
C.    Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural di Sekolah Pembauran Medan .....	69
1.    Profil Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda .....	69

2.	Tingkat Satuan Pendidikan Di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) .....	74
3.	Perwujudan Pendidikan Multikultural Melalui Kultur Sekolah dan Kelas .....	80
	DAFTAR PUSTAKA .....	85

## PRAKATA

---

*Alhamdulillahirabbil'aalamin*, seluruh puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga naskah buku ini dapat terselesaikan. Buku ini ditulis untuk memenuhi ketersediaan buku yang membahas mengenai konsep dan praksis pendidikan multikultural.

Terselesainya penulisan buku ini juga tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan untuk menulis buku referensi pendidikan multikultural. Penulis juga berkeyakinan bahwa hal itu dapat mendukung penulis dalam upaya meningkatkan kualitas diri dan karya untuk waktu yang akan datang. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pihak Yayasan Sultan perguruan Iskandar Muda yang merupakan “Sekolah Pembauran”. Yayasan ini berada di Medan, Sumatera Utara. Sekolah ini telah memberikan banyak informasi terkait bagaimana membentuk sikap demokratis dan multikulturalisme pada peserta didik. Sekolah ini penulis rekomendasikan menjadi laboratorium untuk menerapkan pendidikan demokrasi dan multikultural.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan dan kekurangannya walaupun penulis sudah berhati-hati untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Karena itu, penulis berharap agar pembaca berkenan menyampaikan kritikan. Dengan segala pengharapan dan keterbukaan, penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus-tulusnya. Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Secara khusus, penulis berharap semoga buku ini dapat menginspirasi lebih banyak sekolah lain dalam membentuk sikap mampu hidup berdampingan dalam suasana masyarakat yang multikultural, terlebih di Negara Indonesia tercinta.

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Penulis



# BAB I

## PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

---

### A. Konsep dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang ada di semua masyarakat. Pesan ini dapat dimaknai bahwa pendidikan sebagai sebuah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional yang matang, akan selalu dibutuhkan manusia, karena tanpa pendidikan manusia tidak akan pernah layak disebut ‘manusia’. Seorang filsuf Jerman abad ke-18, Wilhelm Von Humboldt, menekankan pula pentingnya pengalaman dalam proses pendidikan. Ia mengatakan bahwa, “...*experience means continuously transforming man’s observations of world and life into the mind’s inner from which is the center of learning*” (Jurgen Oelkers dalam Palmer, 2001: 81). Menurutnya, mengetahui dan bertindak harus diatur di dalam lingkaran pengalaman manusia, menyediakan apa yang disebut ‘perkembangan akurat dari kekuatan manusia’. Glasser (1992: 174) memberikan pengertian: “*Education is the process through which we discover that learning adds quality to our lives*”. Pendidikan merupakan suatu proses yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pendidikan merupakan gejala semesta (fenomena universal) dan berlangsung sepanjang hayat manusia, dimanapun manusia berada. Dimana ada kehidupan manusia disitu pasti ada pendidikan. (Driyarkara, 1980: 32 dalam Siswoyo, 2013:1)

Dalam bahasa Indonesia disebut pendidikan yang berarti proses mendidik. Kata mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang saling berhubungan. Dari segi bahasa, *mendidik* adalah jenis kata kerja, sedangkan *pendidikan* adalah kata benda. Kalau kita mendidik kita melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Kegiatan menunjuk adanya dua aspek yang harus ada didalamnya, yaitu pendidik dan peserta didik. Jadi mendidik adalah merupakan suatu kegiatan yang mengandung komunikasi antara dua orang atau lebih. (Ekosusilo, 1990: 12).

Pendidikan merupakan sarana bagi manusia untuk membekali diri dengan berbagai ilmu, yang nantinya akan diaplikasikan di kehidupan. Persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Gambar 1.1. Pendidikan  
(Sumber: masukuniversitas.com)

Pendidikan dalam arti mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmaniahnya, pikiran-pikirannya, maupun terhadap ketajaman dan kelembutan hati nuraninya. (Salahudin, 2011: 19-21). Pendidikan adalah aset masa depan dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas. (Sutikno, 2006: 4).

Kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan, karena melalui pendidikan dihasilkan karya cipta. Leslie Smith (dalam Palmer, 2003: 75) memberikan definisi pendidikan dalam pemikiran Piaget yakni sebagai penghubung dua sisi, “di satu sisi, individu yang sedang tumbuh (dan) di sisi

lain, nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggungjawab pendidik untuk mendorong individu tersebut”. Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses manusia untuk menjadi seorang manusia sepenuhnya dengan berbagai tempaan yang ada di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai tiga lingkungan pendidikan yaitu keluarga, sekolah, serta masyarakat.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dimana seorang manusia tumbuh. Hal ini dijelaskan oleh sosiolog Charles H. Cooley bahwa keluarga adalah kelompok primer atau kelompok pertama yang didapatkan manusia pada saat lahir ke dunia. Dalam lingkungan keluarga tersebut, manusia sejak kecil diberikan pendidikan berupa adanya kebiasaan dan nilai-nilai dasar mengenai kehidupan. Sebagai contoh, seorang anak kecil diajarkan orang tuanya untuk mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah memberikannya hadiah. Mengucapkan terima kasih merupakan hal dasar yang diberikan kepada manusia karena ini nantinya akan dilakukan hingga manusia tersebut tumbuh di masyarakat. Keluarga memberikan pendidikan nilai moral serta agama kepada manusia sebelum nantinya akan terjun ke masyarakat.



Gambar 1.2. Pendidikan di dalam Keluarga  
(Sumber: Perpustakaan.com)

Pendidikan di lingkungan keluarga tentu saja tidak cukup apabila hanya di keluarga saja karena belum sepenuhnya manusia mendapatkan pengalaman belajar lebih. Maka dari itulah Ki Hajar Dewantara menyebutkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki jenjang tertentu. Di sekolah inilah manusia

akan mendapatkan banyak hal dalam kegiatan pendidikan untuk memberikan pengalaman belajar tentunya. Sekolah dianggap sebagai tempat yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan tenaga-tenaga pendidiknya yang berkompeten. Dalam aktivitasnya, pendidikan di sekolah tentu mengajarkan kemampuan berpikir, kemampuan ketrampilan, serta kemampuan sikap sosial manusia. Tiga kemampuan inilah yang menjadi bekal manusia untuk terjun ke masyarakat karena hal tersebut melengkapi apa yang belum didapatkan dari keluarga.

Ki Hajar Dewantara kemudian menambahkan lingkungan pendidikan terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan terakhir dalam pendidikan karena pengalaman-pengalaman belajar yang didapatkan manusia di keluarga maupun di sekolah tentu akan diterapkan di masyarakat. Namun di masyarakat pula manusia akan mendapatkan pendidikan tetapi lebih kompleks karena masyarakat memiliki pola yang selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Tak heran, Ki Hajar Dewantara pun menambahkan apabila kita telah terjun di masyarakat maka perlu menerapkan prinsip “setiap orang adalah guru, dan setiap tempat adalah sekolah”. Hal ini tentu beralasan karena setiap orang di masyarakat memiliki pengalaman belajar yang berbeda-beda. Manusia tidak bisa menyamakan antar pengalamannya. Begitu pula dengan tempat di masyarakat karena hal ini memberikan pengalaman belajarnya sendiri.

Tiga lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya pemikiran mengenai konsep pendidikan. Konsep pendidikan apabila ditelaah dari berbagai sudut pandang tentu memiliki makna yang berbeda. Berdasarkan filsafat idealisme, pendidikan adalah suatu proses pengembangan seseorang. Hal ini dituliskan oleh Gutek (1974: 22): “...*education is a process of unfolding that which is latently present in the person;...*”. Hal ini bermakna bahwa proses pendidikan akan memberikan gambaran seutuhnya mengenai hakikat manusia tersebut. Pandangan realism pula menyatakan bahwa pendidikan adalah seni mengomunikasikan kebenaran. Seperti diungkapkan oleh John wild (Gutek, 1974: 39), yakni: “...*education is the art of communicating the truth*”. Konsep pokok pendidikan adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman (Peters, 1980: 5). Dengan demikian, manusia dapat melaksanakan hidup dan kehidupan dengan baik.

Whitehead (tt: 4) menyatakan bahwa: “*Education is the acquisition of the art the utilisation of knowledge*”. Pendidikan adalah bimbingan bagi individu untuk memahami seni kehidupan. Seni kehidupan adalah prestasi yang paling lengkap dari pelbagai kegiatan yang mengekspresikan potensi-potensi makhluk hidup ketika berhadapan dengan lingkungan yang sebenarnya. Lawrence Cremin

dalam Groome (2010: 29) menyebutkan bahwa pendidikan sebagai “upaya sengaja, sistematis dan terus menerus untuk menyampaikan, menimbulkan atau memperoleh pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, keahlian-keahlian, atau kepekaan-kepekaan juga setiap akibat dan usaha itu. Kekuatan definisi pendidikan Cremin adalah tekanannya pada pendidikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terus menerus. Dalam pandangan ini pendidikan selalu mewajibkan kesengajaan. Hal ini sering dinyatakan dengan cepat bahwa seluruh pengalaman adalah pendidikan/*educational*. Kekuatan lain dari Cremin adalah bahwa pendidikan selalu mengarahkan kegiatan pendidikan ke arah manusia yang utuh, pengetahuan-pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai, keahlian-keahlian, atau kepekaan-kepekaan. Cremin dan Whitehead menekankan bahwa pendidikan mewajibkan pendidikan holistik terhadap manusia yang memperhatikan seluruh “seni kehidupan”. Kekuatan keduanya adalah tekanannya pada “potensi-potensi” para naradidik dalam konteks lingkungan sosial mereka.

Mengusahakan peserta didik yang lebih baik dan positif bermakna bahwa pendidikan hendaknya dapat mengupayakan agar orang dapat membina dan mengembangkan dirinya menjadi manusia mandiri yang bertanggung jawab atas terwujudnya eksistensi sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang berbudi dan bermasyarakat (Reksohadiprodo, 1989: 10). Zamroni (2006: 157) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami kehidupan sehingga kelak mereka bisa hidup layak dan berguna bagi diri dan keluarga juga masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sangat perlu bagi peserta didik karena di dalamnya ada proses internalisasi individu dalam melakukan hubungan dengan sesama. Sekolah juga sebagai tempat belajar, berinteraksi, bekerjasama, hidup berdampingan secara damai, saling memahami, menambah pengalaman hidup dalam situasi kemajemukan atau keberagaman.

Pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara hendaknya dapat mengusahakan agar orang dapat membina dan mengembangkan dirinya menjadi manusia *mandireng pribadi* yang merasa bertanggung jawab atas terwujudnya makna eksistensi sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang berbudi dan bermasyarakat. Pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara juga berarti upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak. Dalam artian, supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Reksohadiprodo (1989: 17) menyampaikan bahwa hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah *handayani* atau

memberi pengaruh. Hal ini selaras dengan falsafahnya yaitu *Tut Wuri Handayani* yang bermakna bahwa pendidikan itu memberikan pengaruh atau dorongan dari belakang.

Ki Hajar Dewantara pula mengungkapkan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan dorongan dari belakang tetapi juga memberikan teladan di depan atau *Ing Ngarso sung Tuladha* dan memberikan motivasi di tengah atau *Ing Madya Mangun Karsa*. Melalui pendidikan, seseorang akan memberikan sebuah contoh yang baik bagi orang lain. Hal inilah yang disebut dengan keteladanan. Keteladanan ini secara tidak langsung apabila diilhami maka akan memberikan motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tiga falsafah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk manusia menjadi manusia seutuhnya dengan berbagai situasi dan kondisi yang dialaminya.

Segala situasi yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang dapat disebut pendidikan. Pengertian yang lebih sederhana, pengertian kadang diartikan pula sebagai pengalaman belajar. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "*Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan/atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang*". Usaha ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan membentuk jati dirinya. Proses pendidikan ini tentu dialami oleh setiap orang.

Sesederhana apapun suatu masyarakat pasti terdapat pendidikan. Pendidikan dalam bentuknya yang sederhana telah merupakan bagian dari struktur kehidupan masyarakat (Tilaar, 2009: 1). Pendidikan dan kehidupan adalah dua hal yang saling berkaitan. Berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang kehidupan. Setiawan (2008: 11) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh setiap individu menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaan. Pendidikan selalu menuju ke arah yang lebih baik dan positif. Melalui proses pendidikan inilah manusia secara tidak langsung akan menuju kepada sebuah proses pendewasaan. Apabila seluruh manusia mengalami proses pendewasaan maka terdapat pula proses perubahan positif terhadap masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan dan sekaligus sebagai upaya pewarisan nilai-nilai budaya bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan produk budaya dan sebaliknya budaya merupakan produk pendidikan

formal. Proses kunci memperoleh kebudayaan adalah belajar dan kemudian meneruskan serta mengubah apa yang dipelajari itu. Hal inilah yang membedakan antar setiap manusia karena pasti diantara mereka mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda. Proses pengalaman belajar ini ada yang diterima atau tidak diterima tergantung dari skala rasio pemikiran manusia tersebut.

Pendidikan dalam pengertian luas dapat dimaknai dengan hidup. Mudyahardjo (2010: 45-46) menyajikan arti pendidikan secara luas. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Keluasan pengertian pendidikan juga meliputi tempat berlangsungnya. Pendidikan tidak terbatas dalam satu jenis lingkungan hidup tertentu tetapi berlangsung dan berproses lebih kompleks. Hal ini pula akan diterima oleh manusia di berbagai lingkungan pendidikannya akan berbeda-beda dan tetap dikembalikan kepada rasio pemikiran manusia tersebut.

Beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan pada intinya menyatakan bahwa pendidikan sebagai suatu upaya sosialisasi manusia muda. Pendidikan juga merupakan proses pewarisan budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pada intinya, pendidikan sebagai pengalaman yang tidak terbatas dalam waktu, tempat, dan bentuk adalah bersifat random, yaitu terjadi kapan pun sepanjang kurun waktu usia hidup, di mana pun dalam lingkungan hidup, dan kapan pun dalam perjalanan hidup seorang manusia, serta siapa pun umat manusia adalah pelajarnya, dengan pengalaman hidup sebagai guru, dan lingkungan adalah tempat belajar atau sekolah umat manusia.

Tujuan dalam kehidupan sangat penting. Tujuan akan menjadi petunjuk bagi manusia untuk menentukan langkah-langkahnya. Tanpa tujuan, kehidupan manusia tidak akan lengkap dan terarah. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang mampu berpikir. Setiap manusia memiliki tujuan hidup yang akan mereka capai berbeda-beda. Demikian pula dengan tujuan pendidikan, ia banyak memiliki berbagai macam tujuan. Aman Sharma dalam artikel pendidikan menjelaskan enam tujuan pendidikan (<http://www.preservearticle.com/201102244174/complete-information-on-six-different-aims-of-education.html>), yakni *knowledge aim*, *vocational aim*, *character building aim*, *complete-living aim*, *harmonious*, and *democratic aim of education*.

*Pertama, Knowledge aim.* Dalam bidang tujuan ini, tujuan pendidikan yaitu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. *Kedua, Vocational aim*

yakni bahwa pendidikan harus membangun individu-individu yang memiliki kecakapan sosial. Implementasi tujuan ini yakni adanya kurikulum yang berisikan praktek pengalaman lapangan. *Ketiga, character-building aim*, yakni bahwa pendidikan harus dapat menghasilkan individu dengan *self-realization* atau realisasi diri. Realisasi diri hanya bisa melalui pendidikan moral. Pendidikan penting untuk menanamkan kebajikan-kebajikan moral dan nilai-nilai yang akan membentuk karakter.

*Keempat, complete-living aim*. Pendidikan bertujuan harus dapat membantu individu memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keperluan hidup seperti pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan hidup, melahirkan dan memelihara anak, menyelenggarakan tanggungjawab sebagai warga negara, dan memanfaatkan waktu senggang sebaik-baiknya. *Kelima, harmonious*, yaitu pendidikan bertujuan untuk membangun semua aspek individu baik fisik, intelektual, sosial dan spiritual. Pendidikan sejati yakni pendidikan yang mampu membangun 3H (*Head, Heart, and Hand*) di samping 3R. Dan *keenam, democratis aim of education*. Tujuan pendidikan yaitu untuk menghasilkan warga negara yang demokratis. Pendidikan bertujuan untuk melatih warganegara di masa mendatang dengan tepat. Oleh karenanya tepat jika individu atau manusia dalam kehidupannya memerlukan pendidikan.

Hakikat manusia dijelaskan oleh Tilaar (2009: 22-25) ke dalam beberapa poin, yakni manusia adalah makhluk yang memerlukan pendidikan; manusia adalah *animal educabili*. Maksud pernyataan tersebut adalah manusia memiliki potensi untuk dididik atau dikembangkan, manusia adalah makhluk sosial dengan proses pendidikan terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, serta manusia adalah makhluk yang mampu menjadi pendidik atau *animal edukator*. Berdasarkan pandangan mengenai hakikat manusia yang berbeda-beda tersebut, lahirlah berbagai rumusan tentang tujuan proses pendidikan.

Tilaar (2009: 27-38) menuliskan beberapa tujuan proses pendidikan yang akan dicapai melalui kebijakan-kebijakan tertentu, yakni *pertama*, pendidikan sebagai transmisi kebudayaan; *kedua*, pendidikan sebagai pengembangan kepribadian; *ketiga*, pendidikan sebagai pengembangan akhlak mulia serta religius; *keempat*, pendidikan sebagai pengembangan warga negara yang bertanggungjawab; *kelima*, pendidikan adalah pengembangan pribadi paripurna atau seutuhnya; dan *keenam*, pendidikan sebagai proses pembentukan manusia baru.

Beberapa pakar pendidikan berpendapat bahwa tujuan proses pendidikan adalah pemberdayaan anak didik. Sebagian besar orang saat ini memiliki

pandangannya sendiri-sendiri tentang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan saat ini sudah menjadi urusan publik. Tujuan merupakan hal penting dalam suatu program. Tujuan seringkali hanya menjadi pelengkap suatu program. Tujuan sering lepas dari apa yang dilaksanakan. Oleh karena itu, jangan heran ketika banyak program atau kegiatan-kegiatan yang hasilnya tidak sesuai seperti harapannya. Termasuk tujuan pendidikan nasional Indonesia yang sampai saat ini masih jauh dari tujuan ideal yang dicita-citakan.

Pendapat para pakar tentang tujuan pendidikan pun banyak dipengaruhi oleh akumulasi pengalaman, kepribadian, dan lingkungan setiap individu. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan bagi orang awam menjadi sangat beragam, diantaranya: 1) untuk mempelajari perdagangan yang berguna; 2) untuk membuat hidup menjadi lebih menarik dan menyenangkan; 3) untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bagi kehidupan sehari-hari; 4) untuk menjadi orangtua atau wali yang tidak bergantung; dan 5) untuk mempelajari lapangan kerja yang bermanfaat (Brown, 1970: ix).

Jurge Oelkers dalam Palmer (2001: 81) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses mengubah individu. Wilhelm Von Humboldt mengatakan bahwa tujuan pendidikan, yaitu: “...*the aim of education is to transform the ‘individual of real life’ into general ideas that will guide the life of individuals without forcing them to go in a specific direction*”. Dari pendidikan harus mampu membawa perubahan individu-individu ke dalam suatu pandangan umum yang akan membimbingnya tanpa memaksanya kepada arahan khusus. Proses inilah yang nantinya akan membentuk individu tersebut untuk membuat pengalaman belajarnya sendiri. Hal ini memberikan keleluasaan kepada individu tersebut untuk belajar sendiri dengan proses yang dibuat sendiri. Hal inilah yang menjadikan individu tersebut mengalami proses pendewasaan tanpa dipaksakan oleh siapapun.

John White menganalisis tujuan pendidikan menurut pemikiran Peters (Palmer 2003: 214) yakni “Pendidikan tidak mempunyai tujuan lain di luar pendidikan. Nilainya bersumber dari prinsip dan standar yang tersirat di dalamnya. Menjadi seorang yang terdidik tidak harus sampai pada satu tujuan, tetapi mempunyai suatu pandangan yang berbeda.” Hal tersebut berarti bahwa tujuan pendidikan berasal dari dalam pendidikan itu sendiri, bukan dari luar pendidikan. Proses pendidikan inilah yang memberikan rambu-rambu terhadap individu tersebut untuk aktif mencari dan membuat pengalaman belajarnya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Reksohadiprodjo (1989: 10) salah seorang yang aktif mengembangkan Perguruan Taman Siswa menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang akan dicapai melalui kebijakan-kebijakan tertentu berangkat dari pandangan mengenai hakikat manusia. Pendidikan hendaknya dapat mengusahakan agar orang dapat membina dan mengembangkan dirinya menjadi manusia *mandireng* pribadi yang merasa bertanggung jawab atas terwujudnya makna eksistensi sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang berbudi dan bermasyarakat. Setiap pengalaman belajar dalam hidup dengan sendirinya terarah kepada pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak berada di luar pengalaman belajar, melainkan melekat di dalamnya (Mulyadihardjo, 2010: 47). Apabila tujuan pendidikan tidak ditentukan dari luar harus begini, tetapi ditentukan oleh pengalaman-pengalaman belajar yang beraneka ragam hikmahnya bagi pertumbuhan yang banyak mengandung banyak kemungkinan.

Hanya manusia yang mengalami proses pendidikan. Pendidikan tidak lain merupakan sarana perjuangan yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya yang penuh tantangan dalam rangka mewujudkan harkat dan martabat manusia (Prayitno, 2011). Semua itu menyebabkan tujuan-tujuan dalam keseluruhan pengalaman belajar menjadi tidak terbatas dan tidak direkayasa dari luar proses yang terjadi dalam pengalaman-pengalaman belajar itu sendiri.

## **B. Kebudayaan**

Istilah kebudayaan sering didengar maupun diucapkan oleh semua orang. Akan tetapi, pengertian kebudayaan terkadang direduksi kedalam pemaknaan yang sempit. Kebudayaan hanya dimaknai sebagai kesenian daerah. Kebudayaan memiliki dimensi yang sangat luas ruang lingkungannya. Dari dimensi antropologis, yang juga berangkat dari dimensi biologis, manusia merupakan suatu jenis makhluk cabang dari semacam makhluk primata yang telah melalui proses evolusi secara terus-menerus sehingga makhluk tersebut mempunyai kebudayaan (Koentjaraningrat, 2009: 56-58). Peursen (1976: 37-54) melihat dari dimensi mistis, maka manusia adalah makhluk hidup yang dalam penyelenggaraan hidupnya dipengaruhi oleh daya kekuatan alam sekitarnya.

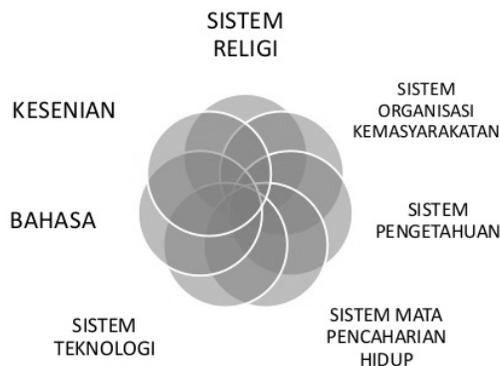
Kebudayaan dapat dimaknai dari berbagai dimensi yang berbeda, sehingga tidak mungkin ada satu definisi tentang kebudayaan yang dapat dirumuskan secara lengkap. Dalam ilmu antropologi, “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 144). Pemikiran C. Wissler, C. Kluckhohn, A. Davis (Koentjaraningrat, 2009: 145)

mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan suatu tindakan kebudayaan, yakni segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar (*learned behaviour*).

Dari dua konsep tersebut, Koentjaraningrat (1985: 104) menyimpulkan bahwa segala macam gejala kebudayaan dapat terjadi dalam masyarakat. Ditinjau dari dimensi wujudnya, kebudayaan yang hanya ada pada makhluk manusia itu paling sedikit memiliki tiga wujud, yaitu: (1) wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia; (2) wujud sebagai suatu kompleks aktivitas; dan (3) wujud sebagai benda.

Koentjaraningrat lebih lanjut menjelaskan tentang kebudayaan dengan memperkenalkan suatu konsep mengenai “unsur-unsur kebudayaan universal” (*cultural universals*). Unsur-unsur kebudayaan universal merupakan semua unsur-unsur yang ada dalam semua kebudayaan di seluruh dunia, baik kecil, bersahaja, dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan dengan suatu jaringan yang luas. Ia menyatakan bahwa dalam semua kebudayaan di dunia ada tujuh buah unsur universal, yaitu dapat divisualisasikan dalam gambar di bawah ini.

### 7 UNSUR KEBUDAYAAN menurut Koentjoroningrat :



Gambar 1.3 Tujuh Unsur Kebudayaan  
(Sumber: [andrianflix.blogspot.com](http://andrianflix.blogspot.com))

Dewantara (1994: 23) memaknai “kultur” atau “kebudayaan” adalah buah dari keadaban manusia. Jelaslah bahwa kebudayaan akan bersifat bermacam-macam. Sebagai buah adab manusia, maka kebudayaan selalu bersifat tertib, indah, berfaedah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Mengembangkan budaya luhur atau tinggi merupakan tugas manusia. Menciptakan kehidupan yang damai dan penuh toleransi merupakan tugas kebudayaan. Apabila masyarakat tidak tertib, tidak bahagia, orang hidup dengan tidak damai, maka adab masyarakat tersebut rendah.

Kata kebudayaan merupakan sebuah kata yang populer dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dewantara (1981: 118), mendefinisikan kebudayaan berdasarkan perkataannya, yaitu “buah budi” manusia dan karenanya, baik sifat lahir, maupun batin, selalu mengandung sifat-sifat keluhuran dan kehalusan atau keindahan, etis dan estetis. Kebudayaan menurut timbulnya atau terjadinya adalah hasil perjuangan manusia, yakni perjuangannya terhadap segala kekuatan “alam” yang mengelilinginya, dan segala pengaruh “zaman” atau “masyarakatnya”, yang kedua-duanya-alam dan zaman tersebut – menyebabkan terus menerus berganti-ganti segala “bentuk” dan “isi” kebudayaan di dalam hidupnya tiap-tiap bangsa.

Kebudayaan merupakan sebuah objek yang tidak mudah diartikan. Kesulitan dalam memberikan arti ini terkait erat dengan sifat kemultidimensian manusia sebagai subjek yang menghadirkan kebudayaan tersebut. Sebagai makhluk hidup yang multidimensi, ‘manusia’ dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai dimensi yang menghadirkan manusia sebagai makhluk hidup (Rahyono, 2009: 40). Oleh karenanya, manusia dapat diartikan dari beberapa dimensi biologis, psikologis, fisis, antropologis, mitis, dan masih banyak lagi sudut pandang yang dapat digunakan. Dari dimensi biologis, manusia adalah makhluk hidup yang bernyawa yang memiliki akal budi, perasaan, serta memiliki kemampuan untuk belajar.

Rahyono (2009: 41) menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal budi untuk bertindak, otak untuk berpikir dan belajar, serta perasaan untuk mengendalikan emosi. Akal budi, perasaan, serta otak dapat diberdayakan oleh manusia untuk mengatasi tantangan dunia kehidupan yang dihadapinya. Pemberdayaan akal budi, perasaan, dan otak inilah yang membuat suatu kebudayaan lahir. Pendidikan direpresentasikan melalui tanda-tanda kebudayaan, yang salah satunya melalui bahasa. Kebudayaan sering diartikan sempit oleh sebagian besar masyarakat. Kebudayaan dapat dimaksudkan sebagai aneka ragam tingkah laku, pola pikiran, pergaulan, dan keserasian dalam

hidup yang diterima/diperbuat oleh anggota masyarakat, sehingga mereka menjadi berbeda dari masyarakat lainnya (Ahmad, 2011: 36). Ia mengatakan bahwa kebudayaan memiliki unsur-unsur materi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kebudayaan memiliki unsur-unsur gagasan dan pengertian.

Pandangan lain mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah ungkapan tentang sesuatu bentuk yang memiliki unsur-unsur materi dan ide gagasan. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Selama ini masalah kebudayaan dan peradaban kurang mendapat perhatian. Akibatnya, terjadi ancaman disintegrasi nilai-nilai dasar yang menjadi tumbuan kebudayaan dan peradaban bangsa. Hal tersebut penting untuk dirisaukan, karena disintegrasi peradaban bangsa pada dasarnya adalah awal perjalanan menuju disintegrasi bangsa itu sendiri, karena tanpa peradaban, bangsa tidak akan pernah ada. Peradaban harus didesain dengan kesadaran, kesengajaan, kebersamaan dan komitmen yang didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Kekerasan primitif dan huru-hara massal akhir-akhir ini memunculkan kesan watak paradoks bangsa. Bangsa Indonesia selain penuh dengan kelemahan-lembutan, pada saat yang bersamaan dapat menampilkan citra amuk masaa dan kebrutalan. Peristiwa kekerasan yang berlarut-larut seperti bentrokan antaretnis dan antarumat beragama, menandakan masih rentannya pemahaman pluralitas dalam bangsa Indonesia. Paradoks kebudayaan ini pada akhirnya menghasilkan krisis kebudayaan yang mengakibatkan bangsa Indonesia seperti kepayahan untuk bangkit. Negara yang dikelola dengan politik monokulturalisme oleh rezim Orde Baru, telah berakibat kepada hilangnya *local culture geniuses*. Sri Sultan Hamengku Buwono X (2008: 6), menjelaskan bahwa tidak adanya pengakuan terhadap budaya etnis tersebut di duga berkaitan dengan strategi pembangunan yang berorientasi pada kapitalisme sehingga memarginalisasi perekonomian rakyat etnis. Dengan mengutip istilah Garin Nugroho (1999), Sri Sultan Hamengku Buwono X lebih lanjut menuliskan bahwa yang “dikhianati” tidak saja soal multikultur, tetapi juga soal agrikultur.

Kodrat agrikultur “dikhianati” dengan pemaksaan pendirian industri-industri, sementara kodrat multikultur “dikhianati” dengan melakukan penyeragaman budaya di berbagai bidang. Garin mencontohkan penyeragaman penanaman padi di Sumba membuat kultur penanaman ilalang menjadi terdesak. Padahal bagi masyarakat Sumba, ilalang memiliki fungsi amat penting, baik sebagai bahan upacara, bahan atap rumah, maupun seni kerajinan. Begitu ilalang terdesak, masyarakat yang terbiasa dengan kultur itu pun mulai kebingungan. Hilangnya multikultur, Ally (2011: 99) memberikan contoh seperti hilangnya

tradisi “Pela Gandong” di Ambon dan “Republik Nagari” di Sumatra Barat merupakan fakta-fakta historis yang diakibatkan oleh penerapan politik monokulturalisme pemerintah Orde Baru.

*Local geniuses* dalam sistem dan tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai, tidak hanya bagi masyarakat sendiri tetapi juga bagi masyarakat yang lain. Ia menambahkan, bahwa *local geniuses* berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dan sekaligus sebagai *early warning system* yang dapat mengantisipasi ancaman terhadap keutuhan tradisi dan sistem sosio-kultural. Hal ini berarti bahwa penghilangan *local geniuses* dapat menghancurkan integrasi dan sosio-kultural masyarakat yang bersangkutan. Politik monokulturalisme yang telah menghancurkan *local geniuses* ini, pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Baginya konflik dan kekerasan yang bernuansa etnis dan agama, yang khususnya marak sejak 1996, tidak terlepas dari hancurnya *local geniuses* tersebut.

Dalam budaya lokal terdapat nilai-nilai kearifan yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran kebajikan bagi kehidupan berbangsa. Sri Sultan Hamengku Buwono X (2008: 26-27), memberikan contoh nilai-nilai kearifan lokal, misalnya dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, mengingatkan betapa pentingnya adat lembaga bagi eksistensi suatu bangsa. Di dalamnya, juga terkandung makna untuk menjunjung tinggi multikulturalisme, sebagai berikut:

*“Padat tembaga jangan dibuang,  
Kalau dituang melepuh jari,  
Adat lembaga jangan dibuang,  
Kalau dibuang binasa negeri”*

Kearifan lokal seperti contoh di atas tersebar dalam ranah dan napas masyarakat Indonesia. Dari Aceh sampai Papua terbentang kekayaan kearifan lokal. Kenyataan tersebut mengharuskan untuk memperhatikan pendekatan budaya sebagai sebuah konsep rekayasa sosial perlu diinterpretasikan kembali secara kritis dan kreatif. Termasuk upaya mewujudkan masyarakat multikultural melalui pendidikan berbasis pendekatan sosial dan budaya. Memperhatikan kasus dan kenyataan di atas, Azyumardi Azra dalam Ally (2011: 99), merekomendasikan pentingnya merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “*integrating forces*” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut. Masyarakat multikultural Indonesia yang demokratis bukan “*taken by granted*”. Lebih jauh diuraikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara

keberterimaan pendidikan multikultural dengan konsep sosial dan budaya di masyarakat. Modal sosial dan modal budaya menjadi unsur penting sejauh mana suatu masyarakat menerima pendidikan multikultural. Baron., Field., and Schuller (2000: 8) menjelaskan bahwa dalam pandangan James Coleman melalui upaya menggali sumber modal sosial dapat menyeimbangkan modal manusia dan modal budaya yang rendah.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, yang memiliki masyarakat multikultural, karena penduduk aslinya merupakan minoritas sementara mayoritas penduduk lainnya merupakan pendatang dari negara-negara lain-maka mereka cepat menerima konsep pendidikan multikultural. Di pihak lain, negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda yang merupakan negara-negara kolonial tidak secepat negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dalam menerima konsep pendidikan multikultural. Hal ini sangat mudah untuk dipahami, mengingat negara-negara kolonial memiliki kebiasaan diskriminatif terhadap negara-negara jajahannya.

Sementara itu, negara-negara yang mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli, seperti India, China, dan Indonesia, meskipun penduduk aslinya memiliki keragaman latar belakang bahasa, ras, suku, dan agama juga relatif lama menerima konsep pendidikan multikultural. Hal tersebut dikarenakan, di ketiga negara itu, khususnya Indonesia, telah menerapkan politik monokulturalisme dalam rangka menghindari konflik antarpenduduk yang berbeda bahasa, ras, sukubangsa, dan agamanya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural penting diupayakan secara sistematis, terprogram, integratif dan berkesinambungan. Menurutnya, salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multikultural.

### **C. Pendidikan dan Kebudayaan**

Berbicara tentang pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang masyarakat. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa hanya masyarakat yang memiliki kebudayaan dan menyelenggarakan pendidikan. Masyarakat mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan mereka melalui pendidikan. Pendidikan diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dalam segala aspek kehidupan dan sekaligus sebagai upaya pewarisan nilai-nilai budaya bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan produk budaya dan sebaliknya budaya merupakan produk pendidikan.

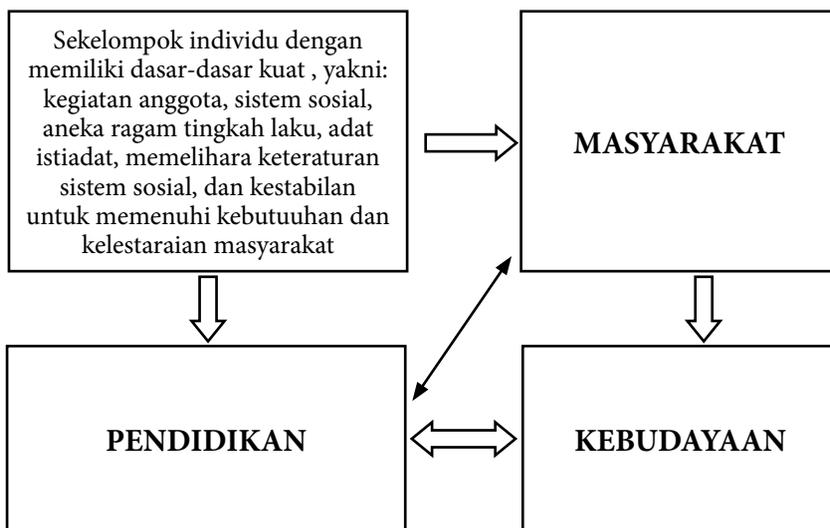
Masyarakat, kebudayaan, dan pendidikan adalah tiga hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Masyarakat terdiri atas sekelompok individu-individu yang bersama-sama mencapai tujuan bersama. Individu-individu membentuk masyarakat karena mereka memiliki dasar-dasar yang kuat. Ahmad (2011: 33-35) menyebutkan dasar-dasar tersebut adalah: *pertama*, kegiatan anggota. Setiap anggota dalam masyarakat harus menjaga dan memperhatikan seluruh kegiatan tersebut; *kedua*, anggota masyarakat seharusnya bekerja dengan suatu sistem tertentu dan garis tegas yang disebut sistem sosial; *ketiga*, harus dipahami bahwa dalam setiap masyarakat memiliki aneka ragam tingkah laku dan aspirasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat sebagai hasil dari pergaulan hidup mereka dan terkadang mereka saling mewariskannya serta mampu membedakan antara mereka dengan masyarakat lainnya; *keempat*, bahwa tujuan-tujuan masyarakat merupakan tujuan bersama dan saling mempengaruhi antara anggota masyarakat tersebut secara terus menerus, sehingga terbentuklah ragam perbuatan, adat istiadat, dan tradisi di kalangan mereka yang pada akhirnya merupakan ciri khas dari masyarakat tersebut; *kelima*, adanya keharusan memelihara apa yang telah dikemukakan di atas dengan teratur dalam suatu sistem kelas dan berbagai sistem sosial lainnya; dan *keenam*, sebaiknya segala sesuatu dalam berbagai aturan di atas dalam keadaan stabil dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang dan kelestarian masyarakat.

Dasar-dasar yang membentuk masyarakat seperti telah disebutkan di atas, akan memberikan corak pengalaman yang khas dan mempengaruhi kebudayaan yang dihasilkan. Keberadaan mereka yang bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya akan menentukan berbagai komunikasi yang spesifik dan pola tersendiri di dalam melakukan berbagai macam kegiatan dan kesepakatan terhadap pola, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria lainnya dalam rangka menentukan suatu pola yang disepakati maupun guna memenuhi beberapa keinginan dan memperjelas watak kehidupan mereka. Dan inilah yang disebut dengan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, sedangkan manusia menjadi anggota masyarakat.

Berbagai kegiatan, pola, dan nilai-nilai yang telah menjadi ciri khas dalam suatu masyarakat perlu dilestarikan dengan cara mewariskannya kepada satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap mampu bertahan. Dalam hal ini, pendidikan diperlukan untuk mempertahankan dan membangun suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk merumuskan bentuk atau pola suatu kebudayaan yang

menjadi ciri khas suatu masyarakat. Pendidikan juga sebagai upaya memindahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan sekaligus sebagai upaya mengembangkan dan mengarahkannya agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.

Namun acapkali kebudayaan sebagai dasar keberhasilan pendidikan diabaikan. Al Muchtar (2007: 286) menyatakan bahwa hal tersebut semakin terasa tatkala orientasi dan terkesima pada budaya lain dengan merendahkan budaya sendiri. Hal ini berakibat pada inovasi pendidikan sering memaksakan konsep asing yang tidak memiliki validitas budaya bangsa. Keterkaitan pendidikan dan kebudayaan dijelaskan oleh Tilaar seperti dikutip oleh Suwarna Al Muchtar, yakni: “premis pendidikan sebagai transformasi sosial budaya berkait dengan menempatkan pendidikan dalam latar budaya, serta mengembangkan pendidikan dengan menggunakan masalah sosial budaya sebagai acuan dasarnya masa lalu, masa kini, dan masa depan...”. Dan dijelaskan pula oleh Henry Giroux dalam Palmer (2003: 495) bahwa inilah yang disebut suatu tinjauan studi kultural mengenai pendidikan, yang melihat proses pendidikan tidak terlepas dari proses pembudayaan. Keterkaitan pendidikan dan kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Keterkaitan Masyarakat, Kebudayaan, dan Pendidikan

Tilaar (2009: 50) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang esensial dalam setiap kehidupan masyarakat. Pamella Munn melalui Baron, et.al (2000: 168) mengatakan: “...for this reason the first priority in education...”

*is learning to live in personal relation to other people. Let us call it learning to live in community*". Kegagalan dalam menyiapkan individu agar mampu hidup di masyarakat adalah kesalahan yang fundamental dan tidak bisa digantikan dengan sukses di bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya, tepat jika ada yang mengatakan bahwa kondisi di masyarakat merupakan cerminan dari apa yang terjadi di sekolah atau dunia pendidikan.

Sekolah selalu dikaitkan dengan perkembangan sosial dan personal anak didik sama baiknya dengan perkembangan kognitif-intelektual mereka. Pengembangan kemampuan sosial dan personal dilakukan melalui kurikulum formal sekolah yang telah diatur sesuai jadwal, melalui kurikulum informal sekolah seperti klub, olahraga, pembuatan drama, dan sebagainya, serta melalui *hidden curriculum*, rutinitas, upacara-upacara, dan praktik-praktik yang mencerminkan kehidupan sekolah, yang mana mampu memberikan pesan kepada anak didik tentang nilai-nilai apa yang harus mereka pahami.

Pendidikan tidak mungkin terjadi atau terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Masyarakat inilah yang nanti dimasuki oleh setiap individu dalam hidupnya, mereka saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Dan oleh karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaannya maka pendidikan merupakan suatu kegiatan budaya. Namun demikian, konsep-konsep maupun praksis mengenai pendidikan dan kebudayaan, belum semuanya melihat keterkaitan yang organis antara pendidikan dan kebudayaan, demikian pula konsep mengenai kebudayaan banyak yang terlepas dari pandangan tentang pendidikan sehingga mengaburkan peranan aktor kebudayaan sebagai hasil dari proses pendidikan.

Keterkaitan pendidikan dan masyarakat dijelaskan pula oleh Zamroni (2011: 135) bahwa setiap warga bangsa pasti memerlukan pendidikan, apabila yang bersangkutan menginginkan dapat berperan dalam kehidupan bangsanya. Seluruh peran-peran dalam masyarakat, seperti peran kultural, peran sosial, peran politik, dan peran ekonomi memerlukan penduduk dengan pendidikan tertentu. Pada umumnya semakin tinggi pendidikan, semakin besar peran yang dapat disumbangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, semakin maju masyarakat semakin banyak memerlukan warga dengan pendidikan yang semakin tinggi. Kondisi yang tidak imbang antara pendidikan dan tingkat perkembangan masyarakat tidak jarang menimbulkan kesenjangan khususnya dalam aspek ekonomi, antara warga terdidik dengan kesempatan kerja yang ada, yang menimbulkan pengangguran, termasuk pengangguran terdidik.

Hasan (2004: 55) menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya pemberbudayaan demi peradaban manusia. Tiap upaya pendidikan bermakna sebagai proses pembudayaan dan sering bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia. Seluruh spektrum kebudayaan hanya bisa dialihkan dari satu generasi ke generasi lain melalui pendidikan. Pendidikan juga tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengetahuan dan keterampilan tetapi juga melalui pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial.

Jelaslah bahwa pendidikan berpengaruh terhadap masyarakat dan sebaliknya masyarakat pun berpengaruh terhadap pendidikan. Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hanya masyarakat yang memiliki kebudayaan. Oleh sebab itu, berbicara pendidikan dan kebudayaan, maka tidak akan terlepas dari hubungan pendidikan dan masyarakat. Kebudayaan sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat, sekaligus ciri khusus bagi suatu masyarakat. Wajarlah bagaimanapun pendidikan itu harus mempengaruhi berbagai pendapat filsafat kebudayaan tersebut.

Pendidikan adalah gejala kebudayaan. Pandangan bahwa pendidikan merupakan gejala kebudayaan didasarkan pada hal-hal berikut: *Pertama*, manusia adalah makhluk budaya. Pendidikan hanya dapat dilakukan oleh makhluk yang berbudaya dan yang menghasilkan nilai kebudayaan yaitu manusia. Hal ini juga yang merupakan perbedaan antara manusia dan hewan dengan budaya dan pendidikan. *Kedua*, perkembangan pendidikan sejajar dengan perkembangan budaya. Pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan (pendidikan bersifat reflektif). Pendidikan juga bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Kedua sifat tersebut berkaitan erat dan terintegrasi. Untuk itu perlu pendidikan formal dan informal. Perbedaan kebudayaan menjadi cermin bagi bangsa lain, membuat perbedaan sistem, isi dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan.

*Ketiga*, pendidikan informal dan pendidikan formal sama derajatnya dan harus ada kesejajaran. Tujuan pendidikan informal lebih dahulu ada daripada pendidikan formal (*education and schooling*). Pendidikan informal merupakan unsur mutlak kebudayaan untuk semua tingkat kebudayaan yang muncul karena adanya pembagian kerja. Pada dasarnya keduanya disengaja dan gejala kebudayaan, pemisahan keduanya tidak berguna. Tugas kebudayaan bukan memonopoli lembaga pendidikan formal tetapi kebersamaan warga dan

negara karena segala unsur kebudayaan bernilai pendidikan baik direncanakan atau tidak.

Dijelaskan pula oleh Ahmad (2011: 47) bahwa pendidikan diperlukan untuk membangun masyarakat. Barnadib (1976: 24) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha manusia yang disengaja untuk memimpin angkatan muda untuk mencapai kedewasaan dan meningkatkan taraf kesejahteraannya, berada dalam suatu lingkungan kebudayaan dan karenanya tidak terlepas dari persoalan-persoalan di sekitarnya. Relasi pendidikan dan peristiwa di masyarakat sangat kuat seperti diungkapkan Yose Ortega dalam Zamroni (2001: 78) bahwa “Sekolah adalah merupakan cermin masyarakatnya. Apabila rusak masyarakat maka rusak pulalah sekolah.” sejalan dengan pendapat Yose Ortega tersebut, Zamroni memperkuat relasi dengan mengutip pendapat Machiavelli dalam bukunya *The Discourses*, yang menyatakan bahwa: “*good examples are the results of good education and good education is due to good laws.*” Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu masyarakat. Karena itu sudah pasti pendidikan merupakan kebutuhan pokok di dalam merumuskan bentuk atau pula suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Selain itu pendidikan juga merencanakan pola pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan sekaligus berupaya bagaimana cara mengembangkan dan mengarahkannya agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah dan berubah tersebut.

## BAB II

### PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

---

#### A. Konsep Pendidikan Multikultural

Kondisi masyarakat yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Dalam kondisi masyarakat tersebut di atas, termasuk di Indonesia, wacana tentang pendidikan multikultural menjadi penting untuk membekali peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya.

Secara etimologis, pendidikan multikultural dibentuk dari dua kata yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya (Zamroni, 2001: 24). Kata multikultural berasal dari dua kata yakni ‘multi’ dan ‘kultural’. Secara umum, kata ‘multi’ berarti banyak, ragam, dan atau aneka. Sedangkan kata ‘kultural’ berarti kebudayaan. Atas dasar ini, multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya. Keragaman kebudayaan ini disebabkan karena latar belakang seseorang juga berbeda-beda. Jadi, pendidikan multikultural yaitu pendidikan yang memerhatikan keragaman budaya peserta didik.



Gambar 2.1 Keragaman Budaya  
(Sumber: [repressoclass.blogspot.com](http://repressoclass.blogspot.com))

Dari istilahnya, pendidikan multikultural memiliki banyak definisi. Banks (2005: 3) menyatakan: “*Multicultural education incorporates the idea that all students---regardless of their gender and social class and their ethnic, racial, or cultural characteristics---should have an equal opportunity to learn in school.*” Sampai di sini pendidikan multikultural diartikan sebagai sebuah definisi bahwa pendidikan multikultural dipahami sebagai sebuah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik---tanpa memandang gender dan kelas sosial, kelompok etnik, ras, dan karakteristik kultural mereka---untuk mendapatkan kesempatan yang sama di sekolah. Di sisi lain, pendidikan multikultural dalam didefinisikan oleh Banks & Banks (2005: 4) yakni “...*is also a reform movement that is trying to change the schools and other educational institutions so that students from all social-class, gender, racial, language, and cultural groups will have an equal opportunity to learn.*” Pendidikan multikultural sebagai sebuah gagasan pendidikan untuk menghilangkan penindasan dan ketidakadilan dalam pendidikan.

Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pengakuan yang menilai penting aspek keragaman budaya dalam membentuk perilaku manusia merupakan hal utama dalam pendidikan multikultural. Banks (2007: 82), memberikan Pengertian pendidikan multikultural, yakni;

*“Multikultural education is also an educational reform movement that tries to reform schools in ways that will give all students an equal opportunity to learn. It describes teaching strategies that empower all students and give them voice”.*

Pendidikan multikultural meliputi tiga hal yakni ide atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan suatu proses (Banks, 2005: 3). Tiga hal tersebut merupakan konseptualisasi pendidikan multikultural, yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria dan wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.

Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural sebagai sebuah ide atau konsep berupaya menegakkan bahwa semua peserta didik harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa memperhatikan ras, etnis, kelas sosial,

atau gender yang melekat dalam diri mereka. Pendidikan multikultural juga sebagai gerakan reformasi pendidikan yang berusaha mereformasi sekolah yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua peserta didik.

Pendidikan multikultural merupakan suatu proses berkelanjutan. Salah satu tujuan utamanya adalah mewujudkan ide-ide demokratis di dalam kehidupan masyarakat dan sekolah. Ide-ide demokrasi tersebut adalah keadilan, persamaan hak, dan kebebasan (Banks, 2007: 82). Wacana pendidikan multikultural dalam berbagai pendapat sering dikaitkan dengan upaya untuk menegakkan kehidupan demokrasi.

Cummins and Sayers (1997: 110) memberikan konsep pendidikan multikultural sebagai suatu upaya untuk menciptakan pemahaman dan penghargaan antar sesama manusia dari semua etnis. Pendidikan multikultural menitikberatkan kepada penilaian dan pemahaman budaya lain. Banks & Banks (2005: 4) menuliskan: "*Multicultural Education is also a reform movement that is trying to change the schools and other educational institutions so that student from all social-class, gender, racial, language, and cultural group will have an equal opportunity to learn*". Pendidikan multikultural merupakan suatu gerakan pembaharuan yang bertujuan mereformasi sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya agar memberikan kesempatan yang sama bagi semua murid dengan status sosial-ekonomi, gender, ras, bahasa, dan kelompok budaya yang berbeda-beda.

Banks & Banks (2005: 7) mengajukan bagaimana pendidikan multikultural dibangun. Pendidikan multikultural dapat digambarkan secara luas sebagai serangkaian program dan praktik yang berkaitan dengan keadilan pendidikan, perempuan, kelompok etnis, bahasa minoritas, kelompok siswa berpenghasilan rendah, serta orang-orang dengan ketidakmampuan fisik. Beberapa konsep pendidikan multikultural menurut Geneva Gay didefinisikan atas karakteristik kultural dari kelompok-kelompok yang berbeda, sementara yang lain ditekankan pada masalah-masalah sosial (seperti: tekanan, kekuatan politik, realokasi sumber-sumber ekonomi).

Nieto (1996) dalam Cumming-Mccann (2003: 1) mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan berbasis antirasisme bagi seluruh siswa dan meresap ke seluruh area persekolahan, karakteristiknya yaitu komitmen atas keadilan sosial dan pendekatan kritis dalam pembelajaran. Lain halnya dengan Geneva Gay yang mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberagaman. Ia menyatakan bahwa:

“*Multicultural education is all about plurality.*” (<http://www.nerel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le0gay.htm>).

Sementara Zamroni (2011: 25) mengaitkan pendidikan multikultural dengan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada prinsipnya adalah suatu proses, di mana siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sekolah. Lewat partisipasi ini, siswa akan berinteraksi dengan guru dan pendidik yang lain untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih baik. Bennet dalam Tilaar (2009: 209) menyatakan bahwa konsep pendidikan multikultural meliputi dua hal. Pertama, nilai-nilai inti (*core values*) dari pendidikan multikultural. Kedua, tujuan pendidikan multikultural.

Musa Asy'ari (2004) menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Dari definisi di atas, yang diberikan Banks dan kedua dari Cummins, Jim, Dennis Sayers, dan Geneva Gay terdapat tiga karakteristik konsep pendidikan multikultural. *Pertama*, pendidikan multikultural diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan; *Kedua*, pendidikan multikultural dimaknai sebagai upaya pengakuan, penerimaan, pemahaman, dan penghargaan atas sesama manusia. Keduanya berangkat dari kenyataan bahwa setiap orang memiliki latar belakang kultural dan sosial yang berbeda-beda; dan *Ketiga*, pendidikan multikultural dikaitkan dengan kekuasaan politik dan masalah-masalah sosial.

## **B. Tujuan Pendidikan Multikultural**

Terdapat banyak variasi tujuan khusus dan tujuan umum Pendidikan Multikultural yang digunakan oleh sekolah sesuai dengan faktor kontekstual seperti visi dan misi, latar belakang sekolah, siswa, lingkungan sekolah, dan perspektif. Tujuan Pendidikan Multikultural dapat mencakup tiga aspek belajar (kognitif, afektif, dan psikomotorik/tindakan).

Dalam pandangannya Nieto (1992) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan murid bekerja dalam keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.

Tujuan pendidikan multikultural Nieto, memiliki persamaan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Banks, Sleeter, dan Sleeter & Grant. Cumming-McCann (2003: 1) memberikan tujuan utama pendidikan multikultural yaitu memajukan pendidikan dan prestasi seluruh siswa, khususnya mereka yang tradisional dan tak terlayani dalam sistem pendidikan. Jadi, tujuan utama pendidikan multikultural tidak hanya memajukan hubungan antarmanusia, membantu siswa merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, atau melestarikan bahasa dan budaya asli siswa.

Cumming-McCann (2003:2) mengutip tujuan pendidikan multikultural dari beberapa pakar pendidikan multikultural, seperti tujuan pendidikan multikultural menurut Howard yaitu *“Teaches how racism hurts not only people of color but also whites, and how it keeps us from being allies.”* Gorski menyatakan bahwa tujuan pendidikan yakni *“Teaches about the shared aspects of racism and other forms of oppression.”* Sementara Sleeter & Grants memberikan tujuan pendidikan multikultural yaitu *“Helps Students, families, teachers, and administrators understand and relate to the histories, cultures, and language of people different from themselves.”*

Sutarno (2008: 1-24 – 1-30) mengemukakan bahwa tujuan Pendidikan Multikultural mencakup: *Pertama*, pengembangan literasi etnis dan budaya. Salah satu alasan utama gerakan untuk memasukkan pendidikan Multikultural dalam program sekolah adalah untuk memperbaiki kelalaian dalam penyusunan kurikulum. Jadi, tujuan utama Pendidikan Multikultural adalah mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas. Informasi ini harus

komprehensif, analitis, dan komparatif, dan harus memasukkan persamaan dan perbedaan di antara kelompok-kelompok yang ada.



Gambar 2.2 Gerakan Literasi  
(Sumber: Kompasiana.com)

*Kedua*, perkembangan pribadi. Dasar psikologis Pendidikan Multikultural menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Penekanan bidang ini merupakan bagian dari tujuan pendidikan multikultural yang berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa, yang berisi pemahaman lebih baik tentang diri yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa.

*Ketiga*, klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan Multikultural mengangkat nilai-nilai yang berasal dari prinsip martabat manusia (*human dignity*), keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Maksudnya untuk mengajarkan generasi muda untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadari bahwa perbedaan budaya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri, dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari manusia.

*Keempat*, kompetensi multikultural. Penting sekali bagi siswa untuk mempelajari bagaimana berinteraksi dengan dan memahami orang yang secara etnis, ras, dan kultural berbeda dari dirinya. *Kelima*, kemampuan keterampilan dasar. Tujuan utama Pendidikan Multikultural adalah untuk memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda. *Keenam*, persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan persamaan multikultural berkaitan erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dan lebih filosofis.

*Ketujuh*, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Tujuan terakhir dari pendidikan multikultural adalah memulai proses perubahan di sekolah

yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Tujuan ini akan melengkapi penanaman sikap, nilai, kebiasaan dan keterampilan siswa sehingga mereka akan menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan (*disparities*) etnis dan rasial dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak berdasarkan komitmen ini. Untuk melakukan itu, mereka perlu memperbaiki pengetahuan mereka tentang isu etnis di samping mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan tindakan sosial, kemampuan kepemimpinan dan komitmen moral atas harkat dan persamaan.

*Kedelapan*, memiliki wawasan kebangsaan/kenegaraan yang kokoh. Dengan mengetahui kekaayaan budaya bangsa itu akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan ini akan tumbuh dan berkembang dalam wadah negara Indonesia yang kokoh. Untuk itu, Pendidikan Multikultural perlu menambahkan materi, program dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi dan stereotipe.

**PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN**

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

**PENDEKATAN PPWK**

- Pembangunan Karakter
- Kerjasama Publik
- Keselarasn Ucapan, Pikiran dan Tindakan
- Kreatifitas
- Keterbukaan

**PEMBENTUKAN PPWK**

Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) diamanatkan kepada daerah untuk membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan bersifat wajib

2016	28 PPWK	34 PROVINSI
	53 PPWK	514 KABUPATEN

Indonesia baik.id | IndonesiaBaik.id | IndonesiaBaik.id | IndonesiaBaikId | Sumber : Kemendagri

Gambar 2.3. Pendidikan Wawasan Kebangsaan  
(Sumber: Indonesiabaik.id)

*Kesembilan*, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia (*world citizen*). Namun, siswa juga harus dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Siswa diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya-*act locally and globally*. *Kesepuluh*, hidup berdampingan secara damai. Dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada gilirannya dapat hidup berdampingan secara damai.

### **C. Dimensi Pendidikan Multikultural**

Konseptualisasi dan implementasi pendidikan multikultural harus tercermin dari seluruh kehidupan di sekolah. Banks (2007: 83) mengungkapkan:

*“To effectively conceptualize and implement multicultural education curricula, programs, and practises, it is necessary not only to define the concept in general terms but to describe it programmatically. To facilitate this process, I have developed a typology called the dimensions of multicultural education”.*

Dimensi tersebut akan membantu para praktisi mengidentifikasi dan merumuskan perubahan-perubahan yang mencerminkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan multikultural serta cara-cara yang kreatif dan efektif. Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai yang biasa, sebagai implikasinya pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak memperlakukan adanya perbedaan secara prinsip untuk bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang budaya, suku bangsa, agama, ras, maupun adat istiadat yang ada.

Banks (2005: 20-23) juga menjelaskan bahwa pendidikan multikultural sebagai suatu proses yang berisi lima dimensi. Kelima dimensi pendidikan multikultural yang diajukan oleh Banks diharapkan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa), yakni (1) *content integration*, (2) *an equity pedagogy*, (3) *an empowering school culture and social structure*, (4) *prejudice reduction*, and (5) *a knowledge construction process*.

Banks (2007: 83-84) dan Johnson (2010: 30-31) menjelaskan kelima dimensi dalam pendidikan multikultural, yakni *Pertama, content integration/integrasi* konten adalah menggunakan contoh-contoh dari kelompok dan budaya yang beranekaragam untuk menjelaskan konsep-konsep dan ide-ide melalui kurikulum atau dalam mata pelajaran. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak diubah, guru sekedar menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

Dimensi integrasi isi digunakan guru untuk memberikan keterangan dengan “kata kunci” pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, sesuai dengan kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

*Kedua, an equity pedagogy* (pendidikan yang sama/adil), didefinisikan sebagai: “...*teaching strategies and classroom environments that help students from diverse racial, ethnic, and cultural groups to attain the knowledge, skills, and attitudes needed to function effectively within and to help create and perpetuate a just, humane, and democratic society*” (Banks, 2007: 92-93). Berdasarkan definisi di atas, pendidikan tidak cukup hanya membekali siswa dengan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung tanpa mempertanyakan asumsi-asumsi, paradigma-paradigma, dan karakteristik-karakteristik kekuasaan. Esensi dari *equity pedagogy* adalah membantu siswa menjadi warganegara yang aktif dan reflektif menuju masyarakat yang demokratis.

Konsep “keadilan di sekolah” adalah salah satu upaya untuk mencapai *equity pedagogy*. Griffin & Batten (1991: 2-3) menjelaskan bahwa istilah keadilan mencakup dua hal, yakni keadilan (*justice*) dan kejujuran (*fairness*). Konsep keadilan dan kejujuran adalah satu konsep yang dalam penerapannya dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, implementasi dari kebijakan yang adil serta praktik di sekolah juga dengan cara-cara yang beragam, antar satu sekolah dengan sekolah yang lain.

*Equity* (keadilan) tergantung pada suatu proses yang dengan proses tersebut *equality* (persamaan hak) akan di capai. Baik *equity* maupun *equality* berangkat

dari pandangan tentang kesetaraan. Parekh (2008: 319) menjelaskan bahwa yang namanya kesetaraan memiliki beberapa tingkatan. Pada level yang paling dasar, kesetaraan meliputi penghargaan dan hak; kemudian pada tingkatan yang agak lebih tinggi meliputi kesempatan, kepercayaan diri, harga diri, dan lainnya; dan tingkatan yang paling tinggi melibatkan kekuasaan, kesejahteraan, dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk pengembangan manusia.



Gambar 2.4. Keadilan  
( Sumber: gresnews.com)

Salah satu cara dalam proses untuk mencapai keadilan adalah melalui partisipasi. Secara tidak langsung, keadilan adalah kualitas dari kemampuan berpartisipasi. Persamaan hak dalam penelitian ini meliputi persamaan hak dalam hal kesempatan (*equality of opportunity*) dan persamaan hak dalam hal hasil (*equality of outcomes*). Persamaan hak juga mencakup bagi perseorangan dan kelompok. Penting dipahami oleh pihak penyelenggara pendidikan, termasuk sekolah sebagai salah satu sub-sistemnya, bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang penuh warna. Sekolah harus secara adil dan sama dalam memberikan pelayanan serta perlakuan bagi kelompok-kelompok yang berbeda dan biasanya memiliki pengalamam yang tidak menguntungkan. Kelompok-kelompok itu seperti: murid perempuan, murid dengan ketidakmampuan/cacat/berkebutuhan khusus, murid dari keluarga berpendapatan rendah/miskin, murid berprestasi tinggi, murid berprestasi rendah, dan lain-lainnya. Persamaan hak tersebut harus direalisasikan dalam kehidupan di sekolah dan dalam lingkungan belajar di kelas.

Strategi mengajar dan lingkungan kelas menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi pencapaian akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok strategi. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok.

Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga terkait pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnis, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

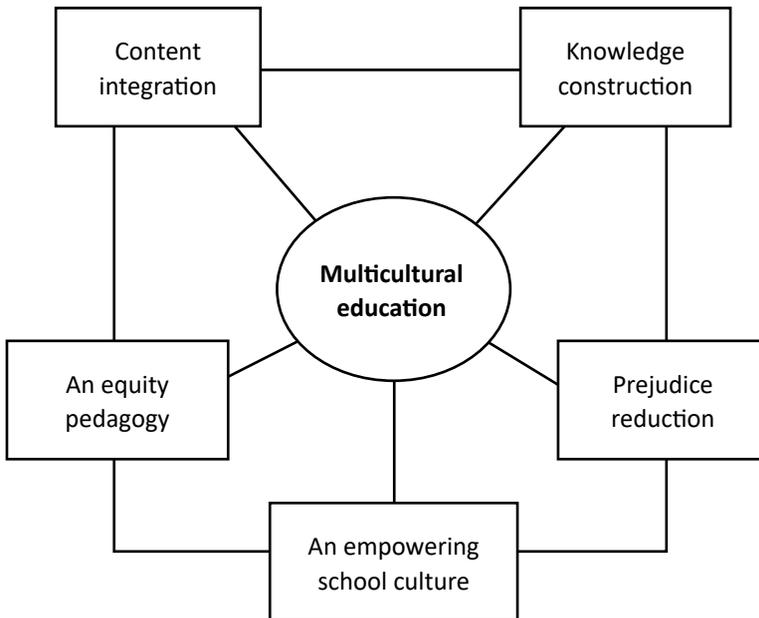
*Ketiga, an empowering school culture and social structure* (pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial), yaitu menciptakan suatu budaya sekolah yang menghargai dan memberdayakan seluruh budaya. Dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstrakurikuler dan penghargaan staff dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

*Keempat, prejudice reduction* (pengurangan prasangka), yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Melatih siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, berinteraksi dengan seluruh dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Guru dapat melakukan banyak upaya untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dengan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran

yang memiliki citra positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus menerus. Guru perlu menggunakan berbagai jenis strategi dan bahan yang dapat membuat para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras, etnik, dan kelompok budaya lain.

*Kelima, the knowledge construction process* (konstruksi pengetahuan), yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin ilmu). Melalui dimensi ini, para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri.

Untuk mewujudkan pendidikan multikultural dengan sukses, harus dipikirkan kembali bahwa sekolah adalah sebagai sebuah sistem sosial dimana variabel-variabelnya sangat berkaitan. Mengingat sekolah sebagai sistem sosial maka harus dirumuskan suatu strategi yang mampu merubah seluruh lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pendidikan multikultural. Keterkaitan lima dimensi pendidikan multikultural dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5. Dimensi Pendidikan Multikultural Menurut James A. Banks

#### D. Sejarah Munculnya Pendidikan Multikultural

Sejarah lahirnya pendidikan multikultural terkait dengan latar belakang masyarakat di mana gagasan tentang pendidikan multikultural ini muncul. Pada awal perkembangannya, pendidikan multikultural muncul di Eropa dan Amerika Serikat (Hanum, 2009: 9). Pendidikan multikultural tumbuh seiring dengan lahirnya gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960an di Amerika Serikat. Banks & Banks (2005: 6) menjelaskan bahwa pada dekade tersebut, orang-orang Afrika Amerika mulai mempertanyakan hak-hak mereka.

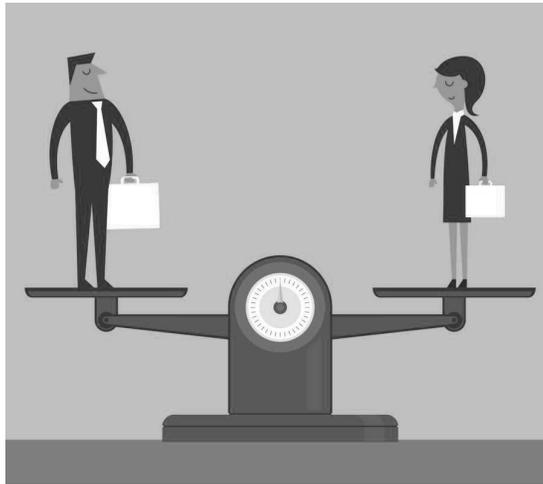
Tujuan utama gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an adalah untuk menghapuskan diskriminasi dalam hal akomodasi umum, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Gerakan ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik kehidupan yang diskriminatif, baik di tempat-tempat kerja, maupun di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Banks & Banks (2005:3) menjelaskan perlakuan diskriminatif terutama dialami oleh laki-laki dari kulit berwarna, khususnya laki-laki Afrika Amerika mengalami ketidakseimbangan perlakuan dan pengskorsan di sekolah. Beberapa penulis menggambarkan keadaan laki-laki Afrika Amerika sebagai suatu “krisis” dan mereka disebut “membahayakan” dalam masyarakat Amerika Serikat.

Ally (2011: 88-89) menjelaskan bahwa praktik kehidupan yang diskriminatif ini karena pada tahun 1950-an, Amerika Serikat hanya mengenal kebudayaan yang dominan, yaitu kebudayaan kulit putih. Sementara golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut digolongkan sebagai minoritas. Banks & Banks (2005: 7) menyebut kultur dominan (kebudayaan besar) dengan “*macroculture*” dan kebudayaan yang lebih kecil/minoritas dengan “*microculture*”. Zamroni (2011: 32) menyebutkan bahwa kebudayaan mayoritas dan dominan adalah MWCA (*Man, White, Christian, and Anglo-Saxon*). Kultur minoritas adalah kultur orang hitam, kultur orang Eropa Timur, kultur Latino dan kultur Asia. Kelompok kultur minoritas inilah yang mengalami diskriminasi dan harus melebur ke dalam kultur dominan, inilah yang disebut dengan kebijakan “*melting pot*”, walau pada akhirnya kebijakan ini gagal.

Kultur dominan di Amerika Serikat oleh Horrace Kallen seperti dikutip oleh Sutarno (2008: 3-4) disebut dengan istilah WASP (*Whites, Anglo Saxon, Protestan*). Kelompok etnis yang lain adalah kelompok orang Amerika keturunan penduduk asli (*Native Americans*), kelompok orang Amerika keturunan Afrika (*African Americans*), kelompok orang Amerika keturunan Asia (*Asian Americans*), kelompok orang Amerika berkebudayaan Spanyol (*Hispanic Americans*),

dan *White Ethnic Americans* (kelompok ini adalah kelompok orang Amerika yang mengaku “tidak terikat” dengan WASP. Jadi, mereka digolongkan dalam kelompok etnik non-WASP. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah orang Jerman, Irlandia, Italia, dan Polandia. MWCA maupun WASP merupakan politik diskriminatif yang terjadi di Amerika Serikat. Masyarakat Amerika Serikat menganut garis patriarkhi. Oleh karenanya, kaum laki-laki memiliki peran dominan dibandingkan kaum perempuan. Mereka yang termasuk dalam golongan laki-laki, kulit putih, Protestan, dan Anglo-Saxon adalah kelompok mayoritas dan mendominasi.

Dalam pendidikan, cukup dibedakan antara pria dan perempuan dalam setiap jenjang pendidikan. Suparno (2001: 29) menjelaskan bahwa dalam pemisahan itu perempuan dipandang sebagai kelas dua. Banyak contoh dalam buku pelajaran dan pengajaran yang menekankan bahwa pria dan wanita itu berbeda; pria lebih unggul. Dalam trend sekarang ini mereka tidak dibedakan, tetapi dihargai sama. Hal ini nampak dalam memberikan contoh maupun dalam buku-buku, tidak boleh ada perbedaan gender lagi.



Gambar 2.6. Kesetaraan Gender  
(Sumber: binakarir.com)

Tujuan pendidikan multikultural di AS lebih condong pada proses Amerikanisasi. Di Amerika, selain karena faktor sosial-kemasyarakatan, munculnya pendidikan multikultural disebabkan karena faktor diskriminasi pendidikan. Banks & Banks (2005: 6) menjelaskan bahwa tujuan utama gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960an yakni berupaya untuk menghilangkan berbagai

bentuk diskriminasi terhadap orang kulit hitam dalam hal fasilitas umum, perumahan, pekerjaan, dan pendidikan. Pendidikan multikultural karenanya sebagai gerakan perubahan termasuk dalam hal kurikulum sehingga dapat merefleksikan pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif mereka.

Selain praktik kehidupan di Amerika Serikat yang begitu diskriminatif, pendidikan multikultural juga muncul sebagai respons atas perubahan demografi. Banks (1997) menyatakan bahwa pada tahun 2020, 46% dari seluruh siswa di sekolah negeri terdiri atas siswa kulit berwarna dan 20,1% dari seluruh anak-anak hidup dalam kemiskinan. Pada dasarnya, pendidikan multikultural merupakan segala sesuatu terkait dengan perubahan sosial melalui pendidikan. Ia menuntut pemikiran kritis dan mendalam, imajinasi, dan komitmen untuk masa yang akan datang. Pendidikan multikultural sebagai tempat berlabuh suara-suara dari orang banyak dalam masyarakat multikultural dan suatu tempat untuk banyak mimpi.

Hanum (2009: 12) mengemukakan bahwa perkembangan pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan gelombang imigrasi. Kaum imigran, dalam perkembangannya memperoleh perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dan kaum mayoritas, sehingga menimbulkan gerakan yang berlatar belakang budaya. Ia menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural di AS dan di Inggris bersifat antarbudaya etnis yang besar, yaitu budaya antarbangsa.



## BAB III

### FILSAFAT PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

---

Istilah pendidikan multikultural diartikan ke dalam berbagai macam sejak kemunculan pertamanya. Pendidikan bisa dikatakan sebagai proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi budaya dalam suatu masyarakat. Pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi tentang adanya keragaman budaya (multikultural) dalam masyarakat. Pemahaman bahwa realita masyarakat tidaklah homogen ini yang mendorong upaya penyadaran individu-individu anggota masyarakat. Hal tersebut perlu diupayakan agar dampak negatif dari heterogenitas masyarakat Indonesia dapat diminimalkan.

Secara filsafati, menurut *National Association for Multicultural Education* (NAME) (2003: 1) menyatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai suatu konsep filsafat yang dibangun atas cita-cita akan kebebasan, keadilan, persamaan hak, hak menurut keadilan, dan martabat manusia sebagaimana dinyatakan dalam beberapa dokumen, seperti: Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, konstitusi Afrika Selatan dan Amerika Serikat, dan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Gambar 3.1. Multikultural

(Sumber: *proprofs.com*)

Kenyataan di atas menegaskan adanya kebutuhan untuk menyiapkan siswa terhadap tanggungjawabnya di dalam dunia yang penuh ketergantungan. Sekolah, karenanya memainkan peran penting dalam mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Pendidikan multikultural menghargai keberagaman budaya dan menegaskan refleksi pluralisme peserta didik, masyarakat dan guru mereka. Pendidikan multikultural menentang segala bentuk diskriminasi yang terjadi di sekolah dan masyarakat dengan mengenalkan prinsip-prinsip demokrasi akan keadilan sosial.

Demokrasi sering disebut-sebut dan dibicarakan orang. Demokrasi dianggap sebagai suatu hal yang menggiurkan bagi banyak orang saat ini. Di antara berbagai sistem dan tatanan masyarakat, demokrasi banyak dinilai sebagai suatu sistem dan tatanan yang paling memadai dan memberikan jaminan akan terlaksananya interaksi dan kerjasama diantara warga bangsa yang bisa mengantarkan mereka mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera (Zamroni, 2011a: 3). Dari tinjauan historis, demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, dari kata *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan atau pemerintahan.

Demokrasi yang berkembang di Yunani kemudian berkembang pasca Perang Dunia II serta runtuhnya komunisme di Eropa Timur, masyarakat dunia mengarahkan pandangan matanya pada demokrasi Barat. Fatwa (2001: 146) menuliskan bahwa menjelang akhir abad XX, tidak ada satu negara pun yang tidak mengaku melaksanakan demokrasi. Bahkan Uni Soviet sebelum tumbang, yang olah para kampiun demokrasi sering dicemooh sebagai negara yang tidak menerapkan asas-asas demokrasi, tidak canggung mengaku dirinya menerapkan demokrasi.

Demokrasi menjanjikan harapan akan sirnanya perang saudara dan kekacauan institusional. Orang sudah capek menyaksikan penindasan orang atas orang. Orang sudah bosan dengan sistem kenegaraan yang despotik dan tiranik yang tidak menghargai subjek manusia. Orang merindukan hubungan antarmanusia yang adil, termasuk hubungan negara dengan warganya (Ketchum, 2004: xi). Lebih lanjut, Ketchum menjelaskan bahwa demokrasi tampak pada masyarakat yang menciptakannya dan pada prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang. Karena demokrasi merupakan produk langsung dari seluruh warganya, tidak ada satu pun masyarakat demokrasi yang mencapai kesempurnaan tanpa mengubah cita-citanya menjadi kenyataan. Warga demokrasi adalah umat manusia dengan segala kebaikan maupun keburukannya: ada yang bijaksana dan yang nekat, ada yang baik dan yang keji, ada yang dapat dipercaya dan yang tidak bertanggung jawab, serta ada yang agamis dan yang materialistis.

Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi sudah direduksi ke berbagai macam dan filsafatnya. Pendidikan multikultural dan demokrasi perlu diangkat menjadi tema dalam wacana pendidikan di Indonesia atau dalam dialog-dialog agar dapat memberikan manfaat yang besar dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan oleh Ahmad (2011) bahwa selama ini kerangka dasar demokrasi adalah untuk menentukan dan memperjelas hak dan berbagai kewajiban, karena itu dalam pendidikan ataupun dialog-dialog yang berkaitan dengan tema demokrasi harus memihak pada upaya mencapai harapan tersebut.

Kebanyakan hukum-hukum atau undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang suatu hukum yang wajib dipegang dan dijunjung tinggi oleh berbagai bangsa khususnya dalam konteks ini adalah mengenai demokrasi pendidikan. Sehingga muncullah berbagai gagasan, kebijakan seperti: SBM, KBK, Blockgrant, dan sebagainya untuk memberikan pendidikan gratis kepada para siswanya. Secara konkret ini sudah terlaksana dan bisa diamati secara jelas. Namun sesungguhnya kesadaran terhadap semua ini adalah keharusan yang harus dilakukan oleh negara demokrasi dan termasuk warga negara yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, perlu adanya kesadaran dan pembiasaan diri mengenai masalah demokrasi itu dengan jalan mendalami arti dan maksudnya. Tentu kesadaran seperti ini tidak akan menjadi jelas sebelum ada usaha membiasakan diri untuk melangkah maju dan membiasakan diri dengan perbuatan yang secara jelas mencerminkan demokrasi. Lahirnya pendidikan dengan berbagai macam cabang dan tingkatan merupakan akibat dari proses pembiasaan tersebut. Ini wajar karena untuk mencapai tujuan tertentu membutuhkan proses.

Membiasakan diri untuk bersikap demokrasi tidak hanya ketika menerima ilmu di dalam sekolah-sekolah, akan tetapi juga pembiasaan diri secara praktis edukatif terhadap dirinya sendiri dimanapun berada. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi.



Gambar 3.2. Demokrasi

(Sumber: Qureta.com)

Pendidikan multikultural merupakan sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Zamroni (2003: 21) menjelaskan pentingnya pendidikan multikultural dalam sebuah masyarakat demokratis adalah bagaimana menghargai dan mengakomodasi perbedaan latar belakang seseorang yang menyangkut nilai, budaya, sosial, ekonomi, bahkan perbedaan dalam kemampuan, meskipun disebutkan dengan istilah yang berbeda, yakni dengan istilah Pendidikan Kebhinnekaan.

## BAB IV

### TEORI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

---

Sejumlah teori tentang pendidikan multikultural diberikan oleh para sarjana, peneliti serta organisasi dalam kurun waktu lebih dari tiga puluh tahun terakhir. *National Association for Multicultural Education* (NAME) salah satunya, menyatakan bahwa:

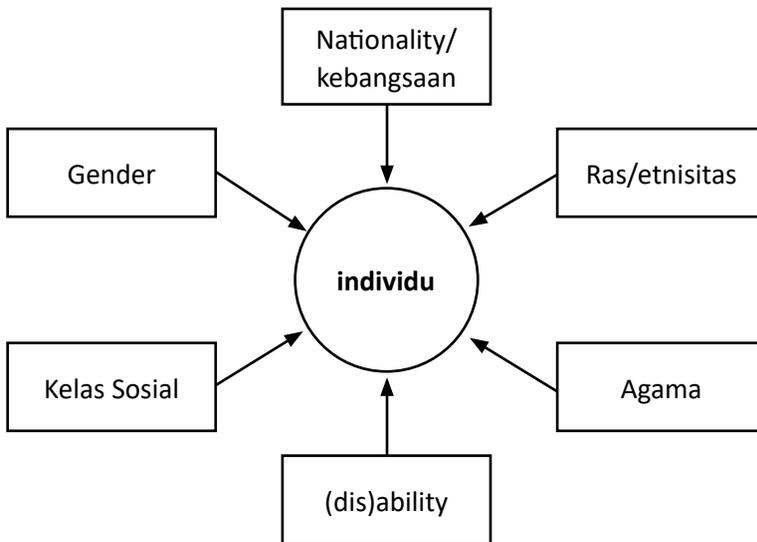
*“Multicultural education is a process that permeates all aspects of school practises, policies and organization as a means to ensure the highest levels of academic achievement for all students. It helps students develop a positive self-concept by providing knowledge about the histories, cultures, and contributions of diverse groups. It prepares all students to work actively toward structural equality in organizations and institutions by providing the knowledge, dispositions, and skills for the redistribution of power and income among diverse groups. Thus school curriculum must directly address issues of racism, sexism, classism, linguisticism, ableism, ageism, heterosexism, religious intolerance, and xenophobia.”*

Pendidikan multikultural dengan demikian meliputi seluruh praktik dalam kehidupan sekolah, mulai dari kurikulum sampai ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Guru dan peserta didik dituntut untuk dapat berpikir kritis dan menganalisis tekanan dan relasi kekuasaan yang terjadi di lingkungannya, masyarakatnya dan di dunia.

Banks (2005: 7) yang dikenal sebagai perintis Pendidikan Multikultural menekankan pada pendidikannya. Menurutnya, pendidikan lebih mengarah pada upaya mengajari bagaimana berpikir. Siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan dan interpretasi yang berbeda-beda. Lebih lanjut dijelaskan bahwa siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Para siswa perlu disadarkan bahwa di

dalam pengetahuan yang dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing.

Berdasarkan pendapat Tiedt dan Tiedt (2010: 11) istilah pendidikan multikultural muncul dan digunakan pertama kali sebagai topik utama oleh Indeks Pendidikan (*Education Index*) pada tahun 1978. Banks (1996: 46) menjelaskan pendidikan multikultural sebagai berikut: “...as a field of study and an emerging discipline whose major aim is to create equal opportunities for students from diverse racial, ethnic, social class, and cultural group”. Seperti sudah diketahui bahwa siswa secara individual menyandang bermacam anggota kelompok yang berbeda, yakni kebangsaan, ras/etnisitas, agama, jenis kelamin, (*dis*)ability/*exceptionality/nonexceptionality*, dan kelas sosial (Banks & Banks, 2005: 14; Gorski, 2008). anggota kelompok yang berbeda-beda tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Keanggotaan Kelompok Beragam pada Individu

Jadi, pendidikan multikultural terutama harus diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dengan latar belakang ras, etnis, dan kelompok-kelompok budaya. Sebagaimana dinyatakan oleh Gorski (2008), yakni “*Multicultural education, at its heart, is about creating equitable and just learning environments for all people in a learning community.*”

Nieto (2004) dalam Zamroni (2011: 3) memandang pendidikan multikultural, yakni: “...as a process that requires not only challenging issues of difference and diversity, but also issues of power and privilege. In other words, when inequitable

*structures, policies, and practises of school exist, they must be confronted*". Nieto dan Bode (2008) meluaskan Pengertian dengan memasukkan tujuh karakteristik pendidikan multikultural, yakni sebagai berikut:

*"First, multicultural education is antiracist. Second, it is basic, meaning multicultural education should be considered as important as reading, writing, and math. Third, multicultural education is critical for all students, not just for students of color, or for those who are considered disadvantaged. Fourth, multicultural education is pervasive. It is embedded in all aspects of school life, environment, lessons, and relationships among teachers, students, and the larger school community. Fifth, multicultural education promotes social justice. Sixth, multicultural education is an ongoing process, complex process that is never fully complete. Finally, multicultural education is an critical pedagogy, building on the experiences, knowledge, and viewpoints of the learners and the teachers"*.

Berdasarkan Pengertian dari Nieto dan Bode di atas, maka pendidikan multikultural memiliki karakteristik seperti: antirasisme, Grant & Sleeter dalam Banks (2005: 64) menjelaskan bahwa ras, kelas sosial, dan gender biasa digunakan dasar untuk membentuk kelompok-kelompok orang di dalam masyarakat. Seorang guru yang gagal dalam mengintegrasikan ras, kelas sosial, dan gender, dapat mengakibatkan adanya pemahaman yang keliru tentang apa yang terjadi di sekolah, bahkan mengarah kepada pemahaman yang tidak tepat untuk keadilan pendidikan.

Dijelaskan pula oleh Zamroni (2011: 140) bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi siswa tanpa memandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan yang setara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat dan bakat yang dimiliki.

Jadi, penekanan dan perhatian pendidikan multikultural lebih difokuskan pada pendidikannya. Selama ini sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada *mengajari bagaimana berpikir* daripada apa yang dipikirkan. Oleh karena itu, siswa harus dilatih dan dibiasakan memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa harus ditanamkan adanya perbedaan dan perlunya masing-masing menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan.

Mereka juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang mereka terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing. Bahkan interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandangnya.

Pendidikan multikultural harus dipahami sama pentingnya dengan pelajaran lain. Pada saat ini nampak pendidikan di Indonesia cenderung bersifat pragmatis dan fragmentaris, dengan biaya yang tinggi, namun tidak menyentuh sisi permanusiaan dari manusia (*humanizing of the human being*) Indonesia. Saat ini, nilai yang dicari dan diperjuangkan dalam pendidikan pun mengalami pergeseran. Meskipun orientasi kognitif yang terlihat dalam pencarian nilai ujian nasional masih sangat menonjol, namun harus mulai diupayakan pencapaian yang lebih menyeluruh, yakni nilai keseluruhan manusia.

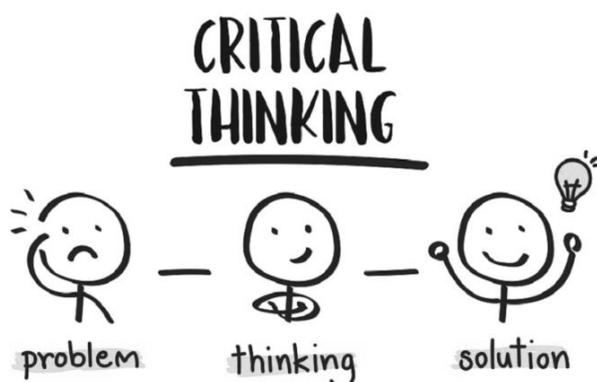
Pendidikan multikultural adalah pendidikan kritis bagi semua siswa, bukan hanya siswa kulit berwarna, atau bagi siswa yang kurang beruntung saja. Pendidikan multikultural meresap ke dalam semua aspek kehidupan sekolah, lingkungan, mata pelajaran-mata pelajaran, dan hubungan antar guru, murid, dan masyarakat sekolah yang lebih luas. Pendidikan multikultural adalah proses yang terus menjadi, proses kompleks yang tidak pernah lengkap. Pendidikan multikultural merupakan ilmu pendidikan kritis, membangun pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang pembelajar serta guru.

Manning dan Baruth (2009) dalam Zamroni (2011) mengusulkan pendidikan multikultural adalah “...is both a concept and process, designed to ‘teach learners to recognize, accept, and appreciate differences in culture, ethnicity, social class, sexual orientation, religion, special needs and gender’”. Pendidikan multikultural dengan demikian adalah konsep sekaligus proses, dirancang agar pembelajar mengenal, menerima, dan menghargai keberagaman dalam budaya, etnisitas, kelas sosial, orientasi seksual, keyakinan, kebutuhan khusus dan gender. Pendidikan multikultural harus menanamkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap keadilan, persamaan hak, dan demokrasi. Manning dan Baruth, Benneth (2011) menyatakan:

*“Multicultural education is a complex approach to teaching and learning that includes the movement toward equity in schools and classrooms, the transformation of the curriculum, the process of becoming multiculturally competent, and the commitment to address societal injustices”.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pendidikan multikultural memiliki fungsi sebagai berikut:

## A. Pendidikan Multikultural Sebagai Pendidikan Kritis



Gambar 4.2. Berpikir kritis  
(Sumber: EF.Co.id)

Pendidikan selama ini lebih banyak mengembangkan kemampuan kognitif siswa dengan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Siswa jarang atau hampir tidak pernah diajak untuk berpikir kritis tentang realitas masyarakat yang sebenarnya penuh dengan berbagai masalah. Pendidikan multikultural harus mampu menjadikan siswa berpikir kritis. Proses berpikir kritis ini dapat dilatih dengan membiasakan cara-cara dialogis antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa dalam proses pembelajaran di kelas.

Sekolah sebagai miniatur masyarakat banyak terjadi *gap* antara *haves and the have-nots* (Hammond, French, & Lopez, 2002: 9), selain itu juga terdapat siswa dengan ras, gender, kebangsaan, dan ketidakmampuan. Pendidikan di Indonesia saat ini belum berpihak kepada seluruh anak-anak warga negara Indonesia. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari keluarga mampu. Memang, ada juga anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengenyam pendidikan, namun cukup pendidikan yang seadanya dan dengan fasilitas yang seadanya juga. Pendidikan seperti ini tentunya tidak demokratis. Pendidikan yang demikian menuju ke arah proses dehumanisasi. Pendidikan harus kritis dan membebaskan. Paulo Freire dalam Noel (2000: 172) mengatakan: “... *The key...is ‘critical and liberating dialogue’..*”

Risakotta (2001: 20) mengutip kalimat Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed*, bahwa pendidikan harus kritis dan dialog yang membebaskan. Pendidikan juga mempertimbangkan masalah-masalah penindasan. Freire mengatakan: “*The pedagogy of the first stage must deal with the problem of the oppressed consciousness*

*and the oppressor consciousness, the problem of men who oppress and men who suffer oppression....”.*

Pendidikan multikultural, berdasarkan Marri (2005: 107) dapat diwujudkan dengan membuat kerangka konseptual, yakni ruang kelas didasarkan Pendidikan Demokratik Multikultural (*Classroom-Based Multicultural Education*) atau disingkat CMDE. Terdapat 3 unsur dalam CMDE, yakni: *building of community* (bangunan dari komunitas), *thorough disciplinary content* (muatan mata pelajaran yang cermat), dan *critical pedagogy* (pendidikan kritis).

Marri menjelaskan lebih lanjut, bangunan komunitas harus mampu membangun lingkungan ruang kelas yang kolaboratif dan saling menghargai. Di dalam lingkungan kolaboratif tersebut siswa dari latar belakang yang berbeda-beda dapat membangun pemahaman satu sama lainnya melalui diskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah. Melalui diskusi-diskusi tersebut, siswa dapat mengembangkan kehidupan demokrasi.

Banks dalam Zamroni (2002: 77) menjelaskan tentang muatan mata pelajaran yang cermat meliputi pengetahuan akademis pokok dan pengetahuan akademis transformatif. Siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa dapat berpartisipasi di sekolah maupun masyarakat. Pendidikan kritis menggunakan pengetahuan akademik transformatif agar siswa memiliki kesadaran sosial dan politik serta sebagai agen kemajuan. Siswa bersama-sama dengan guru membuat analisis catatan-catatan sejarah yang menyajikan ketidaksetaraan dalam struktur sosial, politik, dan budaya.

Marri lebih lanjut mengenalkan “pendidikan deliberatif” sebagai pendekatan dalam pendidikan multikultural. Istilah tersebut banyak digunakan oleh beberapa pakar untuk menyiapkan siswa menuju masalah-masalah sosial yang kompleks, sebagai warga negara yang aktif. Pendekatan ini meliputi diskusi tentang isu-isu kontroversial, simulasi, debat, penelitian proyek, dan penugasan menulis analisis. Pendidikan disebut deliberatif jika mendukung anak didik supaya bergumul dengan isu-isu publik, menguji bukti dan perspektif yang berbeda, membuat daya cipta dan solusi bersama, serta refleksi atas proses pembelajaran.

## **B. Pendidikan Multikultural Sebagai Aspek Politik**

Pendidikan dan ketentuan/aturan berbagai kebutuhan dan tuntutan akan sangat mempengaruhi masyarakat dan menentukan sistem ekonomi serta politiknya. Oleh karena itu, kajian tentang hubungan pendidikan multikultural dengan sistem suatu masyarakat, terkait pula dengan bangunan masyarakat yang

bersangkutan di berbagai bidang. Diantara yang terkait dengan pendidikan multikultural yaitu aspek politik suatu masyarakat.

Deliar Noer dalam Supardan (2008: 493) mengemukakan: “ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat”. Ahmad (2011: 69) mengungkapkan bahwa: “...sistem politik adalah seperangkat norma, kelompok-kelompok sosial, fasilitas-fasilitas hidup dan berbagai lembaga yang berkenaan dengan berbagai lembaga lainnya”. Dijelaskan lebih lanjut, lembaga-lembaga tersebut juga bertanggung jawab atas hak dan kewajiban serta pola pergaulan hidup bermasyarakat bagi setiap orang.

Dari celah lembaga-lembaga tersebut, akan nampak jelas sekali suatu bentuk sistem pemerintahan dan sarana-sarana pelaksanaan berupa tanggung jawab serta untuk mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat, baik watak dari tujuan tersebut maupun sikap seseorang terhadap tujuan tadi serta beberapa tanggung jawab yang akan memeliharanya untuk mendapatkan hak-haknya dan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya. Dibutuhkan juga unsur-unsur kekuatan yang menguasai suatu peraturan bagi sejumlah kelompok masyarakat, anggota maupun pola pergaulan bermasyarakatnya dengan sebagian masyarakat lain.



Gambar 4.3. Politik  
(Sumber: medianarasi.com)

Demikian juga antara masyarakat dan kehidupan politik saling mempengaruhi. Masalah-masalah politik selamanya tetap merupakan masalah penting yang mempengaruhi seluruh bidang kehidupan sosial di berbagai masyarakat, termasuk pendidikan. Berbeda dengan apa yang diungkapkan Karabel & Halsey (1979: 367) yaitu: “...*that schools are not political institutions. The idea that education should be kept out of politics and politics out the schools,...*”.

yang mengisyaratkan bahwa pendidikan harus bebas dari pengaruh politik. Realitas yang terjadi dalam sejarah manusia di dunia ini, pendidikan selalu didominasi oleh budaya yang dominan di dalam suatu masyarakat. Max Weber dalam Karabel dan Halsey (1979: 368-369) diungkapkan:

*“...the power of education..., ...that the educational ideals and practises of a particular society should be viewed in terms of its ‘structure of domination’. Where Weber focuses on the way in which the cultural ideals of the dominant stratum penetrate the **content** of schooling, ....their effects on the **structure** of the educational system.*

Di dalam masyarakat kapitalis, pendidikan juga diarahkan sesuai dengan konteks masyarakat yang bersangkutan. Sekolah-sekolah tidak lebih sebagai alat untuk menghasilkan tenaga siap kerja. Sekolah menjelma mirip dengan pabrik, pendidik sebagai manajer industri, dan murid-murid sebagai bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi.

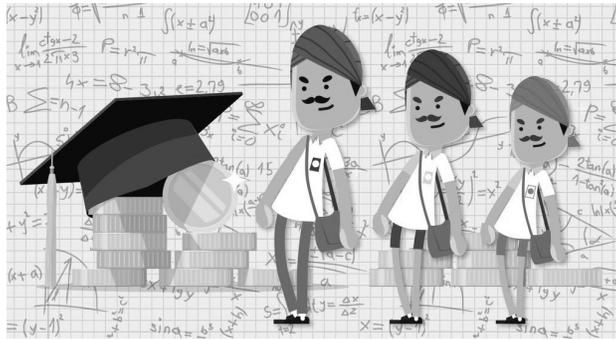
Di sisi lain, hal-hal di atas mengandung beberapa pelajaran menarik yang berhubungan dengan perkembangan kesadaran politik yakni pendidikan politik yang sesuai bagi kehidupan rakyat, seperti misalnya pemberian kesempatan kepada para siswa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, mengupas dan mendiskusikan serta mengungkapkan tentang suasana kejiwaan dan pemikiran-pemikiran mereka, sekalipun kadangkala dalam bidang inipun juga terdapat indikasi, akan arti pentingnya untuk tidak melarang sebagian besar masyarakat untuk mendalami ilmu pengetahuan.

Selain itu peraturan kehidupan juga bisa dikategorikan ke dalam masalah politik. Para politisi harus membuat perencanaan sebaik mungkin dan ilmiah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam rangka melaksanakan percaturan politik tersebut. Hal ini mempunyai arti positif di dalamnya yaitu untuk membangun masyarakat dan membangun seluruh kehidupan seluruh keluarga yang berada di dalam masyarakat tersebut, baik ilmu pengetahuan maupun kesadaran politiknya. Untuk mewujudkan hal itu, dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural, walaupun akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

### **C. Pendidikan Multikultural Sebagai Aspek Sosial**

Masyarakat Indonesia memiliki beberapa pola hidup dan watak yang berbeda diantara berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh adalah pola hidup yang berbeda-beda, baik yang berkenaan dengan masalah ekonomi, maupun dalam

segi-segi kemasyarakatan lain. Dalam keseluruhan kondisi dan situasi yang sama, terdapat suatu hubungan dan ikatan. Selain itu, seyogianya seluruh sarana, sistem sosial (kemasyarakatan) suatu negara dan aneka ragam organisasi harus taat untuk mewujudkan berbagai tujuan dan tuntutan suatu kelas sosial tertentu. Dengan kata lain bisa dipahami, bahwa sistem pendidikan itu akan menciptakan suatu kelas di kalangan rakyat. Maka tidak disangkal, bahwa saat ini banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang hanya mampu dijangkau oleh orang-orang yang mampu (berharta) yang disebut sekolah favorit.



Gambar 4.4. Pendidikan yang di politisasi uang  
(Sumber: tirta.id)

Pada konteks masalah ini, yang harus dipahami bersama adalah bahwa perubahan sistem pendidikan, tidak selalu mengikuti perubahan yang terjadi pada sistem perpolitikan suatu negara dengan sendirinya, namun senantiasa berjalan bersama-sama, bahkan seringkali diawali dengan suatu upaya penghimpunan beberapa kekuatan nasional, dan memperkokoh kekuatan kerjasama dan berjalan serentak pula untuk mengadakan perubahan sistem pendidikan dan perpolitikan dengan jalan meningkatkan aktivitas ekonomi, pembagian tanah menurut sistem lama yakni sistem yang sesuai dengan sistem perbaikan kehidupan agraris secara lebih baik. Selain itu, juga memperhatikan masalah permodalan tertentu dan modal umum, memperhatikan perkembangan pemikiran anggota masyarakatnya, memperbaiki status sosial mereka sehingga benar-benar terwujud sebelum dapat memperbaiki taraf penghasilannya.

Sebagai contoh, apabila dilihat di negara-negara lain, akan sangat nampak tatkala terjadi beberapa ketimpangan dalam sistem kemasyarakatan, maka mereka secara bersama-sama mulai melakukan tindakan untuk meluruskan seluruh sistem prasarana masyarakat, memfungsikan kembali prasarana tersebut untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Dengan cara merubah

beberapa sistem prasarana pembangunan tersebut maupun para anggotanya dan memberikan tambahan perbaikan hidup rakyat, dengan jalan meningkatkan pengawasan kehidupan masyarakat luas, sehingga masyarakat tersebut benar-benar merupakan masyarakat hukum yang bertanggung jawab terhadap beban pendidikan dengan cara selalu meningkatkan kesadaran sosial dan mengantisipasi kelambanan perkembangan masyarakat. Cara yang dapat dilakukan dengan membenahi program-program pendidikan dan berbagai sistem yang dianutnya, sehingga anggota masyarakat akan semakin menyadari arti perkembangan hidup, berbagai syiar pembangunan, dan perubahan-perubahan yang terjadi atau akan masuk ke dalam masyarakat.

Kesempatan diberikan kepada siswa untuk diskusi tentang isu-isu kontroversial, simulasi, debat, penelitian proyek, dan tugas menulis analisa disebut Marri dalam Zamroni (2011: 76) sebagai *Deliberative Education*. Cara lain untuk meningkatkan kesadaran sosial adalah dengan cara mengajar para remaja, sebab remaja ini punya potensi besar untuk membangun peradaban yang lebih baik di kemudian hari.

#### **D. Pendidikan Multikultural Sebagai Aspek Budaya**

Pendidikan umum atau ilmu pengetahuan, salah satunya adalah aspek kebudayaan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan umat manusia. Pada waktu sekarang, pendidikan dituntut dan bertanggungjawab untuk membina generasi-generasi mendatang yang baik dan berupaya mendidik mereka untuk menjadi orang-orang produktif yang dapat membantu pengembangan budaya. Pada saat ini tidak ada yang dapat dimanfaatkan tanpa bantuan ilmu pengetahuan (Ahmad, 2011: 103). Dijelaskan lebih lanjut, tanpa ilmu pengetahuan, mereka tidak akan mampu menggunakan sarana-sarana kehidupan yang merupakan hasil ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Kemajuan apapun bagi negara atau masyarakat, tentu akan memberikan dampak terhadap kemajuan pendidikan dan pengajaran di negara/masyarakatnya. Masyarakat ataupun negara manapun pada saat ini, juga tidak akan mendapatkan senjata yang paling ampuh daripada senjata ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan juga dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi, politik, maupun masyarakat suatu negara. Namun yang menjadi titik fokus adalah bahwa di balik timbulnya perkembangan dan masalah ekonomi, politik suatu masyarakat, sebenarnya saat itu timbul pula masalah-masalah kebudayaan. Saat ini masalah-masalah kebudayaan memang sangat banyak. Di antara masalah-masalah kebudayaan tersebut yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh

masalah ekonomi. Dilihat dari kenyataannya saat ini sebagian besar negara telah terlepas dari kungkungan penjajah, walaupun penjajahan bentuk baru telah banyak mencengkeram negara-negara yang selalu tunduk dengan kekuatan asing.

Namun rupanya, berakhirnya penjajahan bukan berarti masalah dalam negeri ikut terselesaikan semua, karena beberapa fakta menunjukkan bahwa saat ini banyak negara-negara yang mulai mempergunakan kemampuan perekonomiannya untuk hal-hal diluar kemampuannya, sehingga terjerat hutang yang cukup besar, seperti Indonesia, Mexico, dan Pakistan. Pertambahan pendapatan nasionalnya juga tidak sesuai dengan kadar pertambahan dana yang diperlukan untuk mempersiapkan anak-anak yang berusia sekolah.

Di antara masalah kebudayaan yang cukup banyak dihadapi oleh negara-negara saat ini termasuk oleh Indonesia, yaitu masalah kewajiban belajar, pemberantasan tuna aksara di kalangan orangtua, pendidikan anak-anak, lembaga-lembaga sosial, masalah yang berkaitan dengan pekerja wanita, keseimbangan antara pendidikan anak laki-laki dan perempuan, antara pendidikan umum dan kejuruan, pembentukan lembaga pendidikan yang memadai dengan berbagai sistem yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai lembaga maupun berbagai ilmu pengetahuan industri dan pertanian.

Selain berbagai permasalahan di atas, permasalahan yang saat ini melanda bangsa Indonesia adalah krisis sosial budaya. Choirul Mahfud (2008: 2010; xvii) menjelaskan bahwa disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya; berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bernuansa politik, etnis dan agama seperti yang pernah terjadi di berbagai negara, seperti: Filipina, Thailand, Sudan, Nigeria, dan Libya, dan Indonesia.



## BAB V

### EMPIRIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

---

Terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural, seperti yang diungkapkan oleh Gorski (2008), yakni:

*“(1) Multicultural education is a **political movement** that attempts to **secure social justice** for individuals and communities, regardless of race, ethnicity, gender, home language, sexual orientation, (dis)ability, religion, socioeconomic status, or any other individual or group identity; (2) Multicultural education recognizes that, while some individual classroom practices are consistent with multicultural education philosophies, social justice is an **institutional matter**, and as such, can be secured only through **comprehensive reform**; (3) Multicultural education insists that comprehensive reform can be achieved only through a **critical analysis of systems of power and privilege**; (4) The underlying goal of multicultural education—the purpose of this critical analysis—is to provide every student with **an opportunity to achieve to her or his fullest capability**; dan (5) Multicultural education is **good education for all students**”.*

Pendidikan multikultural akan membantu siswa untuk memahami, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda-beda identitas sosialnya. Pendidik memiliki tanggung jawab mengembangkan murid untuk dapat hidup di masyarakat. Integrasi pendidikan multikultural di sekolah dapat melalui kurikulum akan membantu guru dan murid berpikir kritis tentang rasisme lembaga, classisme, sexisme, ablisme, ageisme, dan homofobia (Gollnick & Chinn, 2006: vi). Pada konteks ini dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.

Ilmu pendidikan yang hanya mendidik siswa untuk siap dan mengalami mobilitas kelas-masyarakat yang ada dalam struktur masyarakat-dengan pembagian kelas-kelas sosial yang tajam serta dengan stratifikasi ras, etnik,

juga gender-tidak akan membantu terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis (Banks, 2007: 93). Dalam implementasinya diperlukan pendidikan yang mengajarkan siswa menguasai keterampilan pokok yang digunakannya menjadi agen-agen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Oleh karenanya, pendidikan dalam keberagaman dan masyarakat demokratis harus menjadikan siswa menguasai materi, sikap, dan keterampilan guna memahami secara reflektif, peduli, dan bertindak bijaksana.

Tujuan tersebut bisa dicapai apakah penyajian pendidikan multikultural disajikan monolitik sebagai mata pelajaran ataukah merupakan suatu bentuk penyajian yang terintegrasi. Banks (2007: 93) menjelaskan bahwa strategi *cooperative learning* pun tidak cukup. Implementasi pendidikan multikultural juga mensyaratkan pembongkaran struktur sekolah yang mengakibatkan ketidakadilan. Suatu masyarakat yang didalamnya penuh dengan ketidakadilan, rasisme, serta seksisme, maka cita-cita mewujudkan pendidikan multikultural akan sulit tercapai.

Namun, upaya mewujudkan pendidikan multikultural harus dicapai. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan dalam proses pembelajaran di kelas-kelas. Salah satu pendekatan pembelajaran adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah yang disebut lintas batas dari disiplin ilmu pengetahuan (*border crossing*). Implikasinya, pendidikan multikultural sebaiknya tidak diberikan dalam satu mata pelajaran yang terpisah, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan. Dalam mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, dan mata pelajaran bahasa, tujuan yang telah dirumuskan mengenai pendidikan multikultural dapat dicapai tanpa memberikan suatu mata pelajaran tertentu. Dalam mata pelajaran kewarganegaraan (*civic education*), pendidikan moral (*moral education*), IPS (*social studies*), sejarah (*history*), ataupun ilmu-ilmu sosial yang lain, merupakan wadah untuk menampung program-program pendidikan multikultural.

## **A. Pendidikan Multikultural di Beberapa Negara**

Sejak Perang Dunia II, banyak imigran menetap di Inggris dan negara-negara di benua Eropa, termasuk Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, dan Switzerland (Banks & Banks, 2005: 5). Hampir semua imigran dan kelompok-kelompok etnis di Eropa, Australia, dan Kanada menghadapi problema yang sama dengan pengalaman Amerika Serikat dalam hal kelompok etnis. Orang-orang Jamaika di Inggris, orang-orang Aljazair di Perancis, dan orang-orang Aborigin di Australia



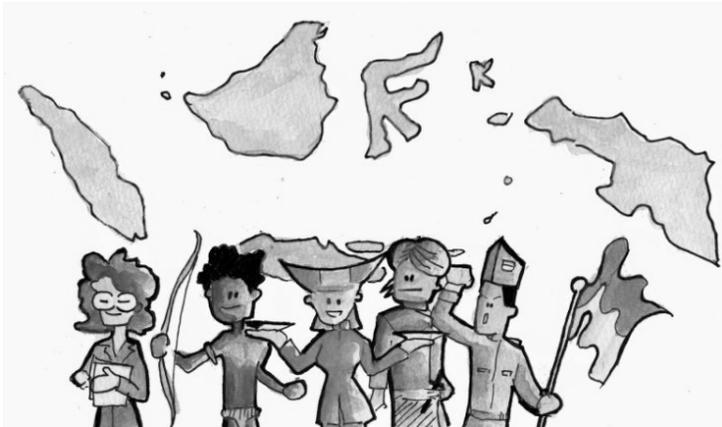
## **B. Pendidikan Multikultural di Indonesia**

Gaung wacana pendidikan multikultural tidak hanya muncul di negara-negara Barat, Asia juga tidak lepas dari gerakan pendidikan multikultural, termasuk Indonesia. Hanum (2009: 14) menjelaskan bahwa multikultural yang terjadi di AS, Inggris, dan negara-negara di Eropa, pada umumnya bersifat budaya antarbangsa, keragaman budaya berasal dari luar bangsa mereka. Di Indonesia, multikultural bersifat budaya antaretnis yang kecil, yaitu budaya antarsuku bangsa. Keragaman budaya dengan demikian berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, kondisi ini sebenarnya dapat menjadi modal yang kuat bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia.

Wacana multikulturalisme untuk konteks di Indonesia menemukan momentumnya ketika sistem nasional yang otoriter-militeristik runtuh seiring dengan jatuhnya rezim Soeharto. Sejak itu sampai sekarang, kondisi negara Indonesia seperti menjadi kacau dengan mencuatnya berbagai konflik antar sukubangsa dan antar golongan. Nilai-nilai kebangsaan yang mencapai puncaknya dalam semangat Sumpah Pemuda dapat menjadi ruh yang kuat untuk mempersatukan warga negara Indonesia. Melalui berbagai upaya, nilai-nilai kebangsaan tersebut harus terus ditanamkan, mengingat kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia yang beragam, apabila terlupakan maka keragaman budaya berpotensi besar menjadi modal perpecahan dan konflik.

Menurut Sosiolog UI, Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengganggu perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsa dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat diwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal persamaan hak serajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Dilihat dari beberapa aspek, Indonesia terdiri atas bermacam-macam karakteristik. Sutarno (2008: 3-20, 3-21) menyebutkan, antara lain: jumlah penduduk yang besar dengan keterampilan yang rendah; wilayah yang luas; posisi silang Indonesia; kekayaan alam dan daerah tropis; jumlah pulau yang banyak; persebaran pulau yang “terhalang” oleh laut; kualitas hidup yang tidak seimbang; serta perbedaan dan kekayaan etnis.



Gambar 5.2. Indonesia Terdiri atas Bermacam Karakteristik  
(Sumber: *Inspirilio.com*)

Di samping karakteristik seperti tersebut di atas, Ally (2011: 98-103) menyebutkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak problema tentang eksistensi sosial, etnik, dan kelompok keagamaan yang beragam. Problema tersebut sebagai akibat dari upaya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Motto “BHINNEKA TUNGGAL IKA” lebih mengutamakan ke-TUNGGAL-an daripada ke-BHINNEKA-annya (Mangunwijaya, 1999: x).

Swasono (2012: 6) menjelaskan bahwa doktrin kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, yaitu multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation state* berikut nasionalisme yang terkandung di dalamnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah lebih muncul di Indonesia jauh sebelum Amerika Serikat mencetuskan *E Pluribus Unum*. Bhinneka Tunggal Ika dikumandangkan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 sebagai rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan dari pluralisme dan multikulturalisme kaum anak negeri se-Nusantara. *E Pluribus Unum* menjadi simbol persatuan dan kesatuan rakyat Amerika Serikat dari multikulturalisme kaum pendatang (kaum imigran) yang dikumandangkan tatkala Amerika Serikat merdeka pada tahun 1776.

Hal tersebut di atas bahwa terdapat perbedaan antara pendidikan multikultural yang lahir di Amerika Serikat dengan Indonesia. Di Indonesia, multikulturalisme datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri, sementara multikulturalisme di Amerika Serikat datang karena faktor banyaknya kaum imigran. Sebagai *common platform* bagi multikulturalisme di Indonesia yaitu

Pancasila. Oleh karena itu Pancasila adalah “asas bersama” yang tunggal bagi seluruh warganegara yang *bhinneka*, yang menjadikannya identitas bangsa ini.

Rezim Orde Baru memerintah dengan mengabaikan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari sukubangsa, bahasa, agama, maupun budayanya. Pemerintahan pada masa ini lebih mengedepankan kebijakan monokulturalisme. Karenanya Mahfud (2010: 87) dengan mengutip Muhaemin el-Ma’hady menjelaskan bahwa akar sejarah multikulturalisme di Indonesia bisa dilacak secara historis, yakni kurang lebih selama tiga dasa warsa lebih kebijakan yang sentralistis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul karena adanya perbedaan secara terbuka, rasional dan damai.

Tabel 1. Sejarah Kelahiran Pendidikan Multikultural

Nama Negara	Faktor Pemicu Kelahiran	Media
Amerika Serikat (1960-an)	Praktik kehidupan sosial yang diskriminatif	Gerakan hak-hak sipil 1960-an
	Sistem pendidikan yang tidak adil	Kajian melalui pusat-pusat studi etnik
Belgia, Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, Swedia (1980-an)	Praktik kehidupan sosial yang diskriminatif dan sistem pendidikan yang tidak adil	Tuntutan terhadap keadilan dan demokrasi dalam pendidikan
Australia (1975)	Kesadaran pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan multikultural	Program anti-rasisme melalui pendidikan
Indonesia (2000)	Politik penyeragaman dan monokulturalisme selama pemerintahan Orde Baru	Kajian melalui simposium, diskusi, seminar, workshop, serta wacana ilmiah melalui koran, jurnal, dan buku.

Sumber: Diadopsi dari Abdullah Ally (2011: 101)

Dari tabel di atas, ternyata terdapat perbedaan penting tentang sejarah kelahiran pendidikan multikultural di dunia. Jika sejarah kelahiran pendidikan multikultural di Amerika dan Jerman dilatarbelakangi oleh faktor praktik kehidupan sosial yang diskriminatif dan sistem pendidikan yang tidak adil; maka sejarah kelahiran pendidikan multikultural di Australia dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan multikultural. Berbeda dengan kondisi di Indonesia, pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh politik penyeragaman dan monokulturalisme yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru.

Gagasan Freire (Paul Suparno, 2001: 29) tentang pendidikan, yakni pendidikan harus membangun kehidupan demokratis, hubungan dialogis antara siswa dan guru, dan keaktifan siswa dalam ikut menentukan banyak hal dalam pembelajaran, kesadaran siswa yang kritis terhadap masalah yang dihadapi, sangat tepat dan dapat dijadikan acuan pendidikan di Indonesia. Dalam banyak praktik pendidikan baik dari TK sampai dengan PT, unsur harapan dan impian kadang hilang dan tidak dikembangkan. Maka bila ingin anak didik memang punya cita-cita maju, unsur harapan dan impian perlu ditekankan dan dikembangkan. Anak didik mampu berkembang menjadi warganegara yang aktif dan siap menghadapi harapan dan impian untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan sosial yang kompleks, maka harus mulai dibangun dalam proses-proses pembelajaran di kelas.

Anak didik penting untuk dibiasakan berpikir kritis dalam pendidikannya. Hal itu karena anak didik yang paling dipengaruhi oleh kebijakan dan praktik sekolah. Sebagaimana Nieto dalam Billings & Gilborn (2004: 179) bahwa: *"Students are the people most affected by school policies and practices,...."*. Pendidikan multikultural selama ini mengabaikan suara atau masukan anak didik, padahal itu adalah inti dalam pendidikan multikultural kritis. Lebih lanjut diungkapkan oleh Nieto: *"... That is, the insistence that students must be involved in the process of their own education, a central tenet of critical pedagogy, has inspired the inclusion of student voices that had heretofore been missing from most treatments of multicultural education...."*. Suara anak didik dapat bersumber dari pengalaman-pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari, tentang kemiskinan, rasisme, dan pengasingan (alienasi) atau masalah-masalah sosial lainnya.

Nugroho (2008: 3-4) mengemukakan hal yang sama. Fakta di Indonesia saat ini adalah adanya gejala sekolah-sekolah negeri cenderung mengembangkan diri menjadi "sekolah favorit". Sekolah ini menjadi idaman dan banyak orang kaya menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Antara orang tua dan sekolah bisa

berkolaborasi untuk membangun infrastruktur “luks”. Di dalam sekolah negeri yang bukan sekolah favorit yang diberikan hanya menu dasar.

Sekolah-sekolah biasa atau sekolah negeri biasa dengan menu dasar, fasilitas yang biasa-biasa saja bahkan sangat terbatas, dan memiliki beberapa potensi yang sangat terbatas, secara tidak langsung sekolah-sekolah seperti itu sebenarnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum, masyarakat kelas bawah, atau masyarakat yang tidak mampu. Bahan-bahan pelajaran pun sangat berbeda dengan bahan pelajaran di sekolah favorit. Berbagai pelajaran bahasa misalnya, diajarkan di sekolah-sekolah bermutu tinggi tersebut, sedangkan di sekolah biasa hanya sebatas diajarkan bagaimana mereka bisa membaca dan menulis serta menguasai beberapa ilmu dasar dengan baik. Guru yang mengajar pun berbeda kualitasnya. Paling tidak di sekolah favorit, gurunya juga harus berkualitas. Diskriminasi ini terlihat sangat jelas dalam pendidikan di Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat masih kurang memberikan perhatian kepada anak-anak yang dari sekolah biasa untuk melanjutkan studinya ke pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Fakta-fakta seperti tersebut di atas sampai saat ini masih banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia.

Tujuan pendidikan multikultural di Indonesia, berbeda dengan tujuan pendidikan di Amerika Serikat. Dijelaskan oleh Zamroni (2007: 269-270) bahwa tujuan pendidikan multikultural di Indonesia “... merupakan refleksi atas kesadaran diri atas realitas masyarakat yang mejemuk”. Oleh karena itu, pendidikan multikultural difokuskan kepada pengembangan kesadaran dan kebersamaan dalam konteks perbedaan kultur masyarakat. Ditegaskan oleh Zamroni (2011a: 147) bahwa pendidikan multikultural adalah suatu gerakan pembaharuan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa.

Agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan yang beragam seperti ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menjadi satu kekuatan yang dapat menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman masyarakatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada anak-anak lewat pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun pendidikan multikultural bukan hanya sebatas kepada anak-anak usia sekolah tetapi juga

kepada masyarakat Indonesia pada umumnya lewat acara atau seminar yang menggalakkan pentingnya toleransi dalam keberagaman menjadikan masyarakat Indonesia dapat menerima bahwa mereka hidup dalam perbedaan dan keragaman.

Poin penting yang harus diperhatikan dalam melihat pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah setelah menganalisis penelitian-penelitian di atas adalah dari pemikiran pelaku pendidikan di sekolah seperti: kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, serta orangtua siswa; dan praktik implementasi pendidikan multikultural di sekolah, seperti: pengembangannya melalui kurikulum, pembuatan modul pembelajaran bagi guru serta modul belajar siswa, praktik dalam proses pembelajaran di kelas oleh semua guru mata pelajaran, dan kebijakan-kebijakan yang memihak demi terwujudnya pendidikan multikultural di lingkungan sekolah.

Keragaman adalah suatu hal yang sudah sejak awal diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Keragaman di satu sisi dapat menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal membangun bangsa, tetapi di sisi lain justru menimbulkan potensi untuk terjadinya konflik baik horisontal maupun vertikal. Sisi yang terakhir menjadi semakin nyata dengan terjadinya berbagai aksi konflik yang berujung pada aksi-aksi kekerasan yang disebabkan oleh masalah etnis, agama, ras, ketidakadilan politik, ekonomi, dan berbagai perbedaan lainnya.

Keragaman tersebut di atas terdapat dalam mozaik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas masyarakat yang majemuk dari sisi ras, etnis, agama, dan budaya. Keragaman tersebut akhir-akhir ini menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan oleh semua pihak. Tujuannya tidak lain agar keragaman tidak menjadi faktor pemicu semakin banyak dan luasnya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus mulai usaha-usaha penanaman kesadaran bahwa masyarakat Indonesia sudah sejak pembentukan bangsa Indonesia terdiri atas berbagai ras, etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui jalur pendidikan. Berdasarkan pendapat para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal (timbang balik) antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya di dalam masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, dalam aspek kemajuan, peradaban, dan sejenisnya, tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh sebab itu, majunya dunia pendidikan dapat dijadikan cermin majunya masyarakat, dan

dunia pendidikan yang kacau juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang juga penuh persoalan.

Sekolah memiliki peran penting untuk membantu siswa membangun pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat menjadi warganegara efektif dalam suatu masyarakat pluralistik dan demokratik. Sekolah yang dapat berfungsi sebagaimana diharapkan di atas, hanya bisa terwujud ketika sekolah mau melakukan transformasi. Pendidikan multikultural menawarkan suatu cara untuk mewujudkan warganegara yang ideal. Terdapat tiga alasan mengapa pendidikan multikultural harus diajarkan kepada warganegara. Alasannya adalah: *pertama*, pendidikan multikultural menawarkan cara menciptakan pendidikan bagi semua; *kedua*, pendidikan multikultural dapat membantu warganegara sadar akan tanggungjawabnya; dan *ketiga*, pendidikan multikultural mengajarkan kepada para siswa menghargai hak-hak azasi manusia lainnya.

Sekolah-sekolah yang ada saat ini masih *terbatas* bagi lapisan-lapisan masyarakat tertentu. Banks mengenalkan dimensi-dimensi sebagai dasar pijakan untuk melakukan transformasi struktur sekolah. Dimensi tersebut meliputi: 1) *content integration*; 2) *the knowledge construction process*; 3) *prejudice reduction*; 4) *an equity pedagogy*; dan 5) *an empowering school culture and social structure*. Banks & Banks (2005: 3) menyatakan pula bahwa pendidikan multikultural paling tidak meliputi tiga hal, yaitu: ide/konsep, proses, dan gerakan reformasi pendidikan. Kelima dimensi di atas oleh Maurianne Adams dan Barbara J. Love dalam Zamroni (2011: 149) dapat dijelaskan dengan menganalisis beberapa aspek yang terkait dengan faktor-faktor pembelajaran. Faktor-faktor tersebut meliputi: siswa, guru, kurikulum, dan *pedagogy*.

Gorski (2008), memberikan beberapa alternatif bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang tepat dan adil dengan memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan pembelajaran. *Pertama*, faktor siswa. Siswa datang ke sekolah membawa ide-ide yang berbeda-beda antarsiswa satu dengan yang lain. Pembelajaran dapat dilakukan di antaranya dengan: menggali pandangan siswa tentang stereotipe, tantang pendapat siswa dalam hal perilaku dan hubungan yang memperlihatkan peran berdasar stereotipe, dan membentuk tim kerjasama atau kelompok kecil.

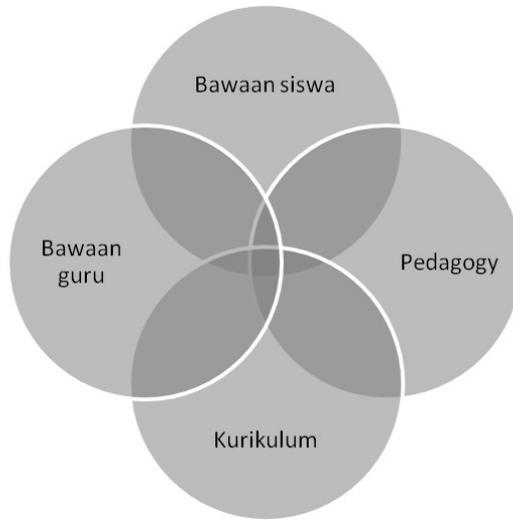
*Kedua*, faktor guru. Hilangkan pandangam-pandangan yang bias, prasangka, dan asumsi-asumsi; kembangkan teknik-teknik mengajar yang cocok; menyediakan kesempatan periodik kepada siswa untuk berbagi balikan tanpa nama; kenalkan isu-isu kesetaraan dan cara untuk menyadarinya; dan

memberikan pujian. *Ketiga*, faktor konten kurikulum dapat dikembangkan dengan cara seperti: memberikan tugas yang menantang terkait dengan peran masyarakat tradisional; menggali sumber-sumber belajar sebagai suplemen pembelajaran; menghindari penggunaan istilah-istilah yang membedakan; menggunakan bahan-bahan pembelajaran yang berbeda-beda dan teknik mengajar yang bervariasi; dan mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang tidak saja berkaitan dengan materi belajar tertentu namun juga materi belajar lainnya.

*Keempat*, faktor *pedagogy*. Pendidikan diselenggarakan dengan: melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran (diskusi terbuka, mengajukan pendapat, dsb); membangun keterampilan untuk memudahkan adanya “dialog yang sulit” tentang rasisme, seksisme, dsb.; serta merancang penilaian yang dapat mendorong siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia.

Zamroni (2011: 149-150) menjelaskan faktor guru dalam pembelajaran adalah bahwa setiap guru, terkait predikatnya sebagai makhluk yang unik dan misterius memiliki sifat bawaan sendiri-sendiri yang sifatnya sangat pribadi. Siswa juga datang ke sekolah dengan motivasi bawaan sendiri-sendiri. Kurikulum sekolah dapat dipersepsi dan memiliki dampak berbeda pada individu-individu siswa. Apalagi, yang namanya ilmu sebagai materi pembelajaran tidak senantiasa bersifat “*value-free*”. Dan, pedagogik di tangan guru berbeda bisa memiliki makna dan dampak yang berbeda. Keempat faktor di atas harus diramu sedemikianrupa dalam suatu proses pembelajaran.

Proses pembelajaran berkaitan erat dengan kemampuan bawaan siswa baik intelektual maupun finansial. Siswa dengan tingkat sosial ekonomi rendah, tentu dalam kemampuan mengikuti pembelajaran berbeda dengan kelompok siswa yang datang tingkat sosial ekonomi tinggi. Di sinilah perlunya guru memiliki kemampuan mengendalikan proses pembelajaran, agar semua kelompok siswa dapat mengikuti dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pendidikan multikultural sulit mencapai sasaran karena masih terjadi ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan yakni: “...*disparities in educational opportunities and outcomes among ethnic groups continue to grow, the resulting achievement gap has reached crisis proportions*” (Zamroni, 2011: 150). Keempat komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.4. Berbagai Faktor dalam Pembelajaran

Menurut relasi yang dikemukakan di atas, maka pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan peradaban dan kemajuan yang mengikutinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya. Pendidikan dalam hal ini sebagai salah satu media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif. Pendidikan bersifat sistemik, dengan penyebaran yang cukup merata. Lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan telah tersebar secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana yang cukup efektif untuk mencapai tujuan ideal ini. Melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan di sekolah diharapkan dapat membangun masyarakat demokratis, yang dapat menghasilkan warga negara yang menyadari, mengakui dan menghargai perbedaan atas suatu keragaman.

Multikulturalisme telah merupakan wacana bagi para akademisi maupun praktisi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia dewasa ini. Berbagai upaya seperti seminar diadakan membahas mengenai multikulturalisme. Demikian pula telah muncul pendapat berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dan memungkinkan dilaksanakan untuk memecahkan konflik horisontal yang nyaris memecahkan integrasi bangsa Indonesia dewasa ini dari sudut kebudayaan dan bukan melalui cara-cara kekerasan ataupun cara-cara lain yang tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam.

Apabila multikulturalisme merupakan wacana dalam bidang kebudayaan dalam arti luas seperti pengembangan identitas suatu kelompok masyarakat, demikian pula dalam pengembangan suatu negara-bangsa (*nation-state*) diperlukan rasa identitas dari kelompok bangsa itu. Oleh sebab itu juga pendidikan tidak terlepas dari wacana tersebut di atas. Dalam pendidikan multikultural terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (*social Justice*), demokrasi, dan hak asasi manusia. Pendidikan multikultural tidak hanya membatasi pada masalah budaya saja. Namun, dalam praksis pendidikan, pengertian budaya saja tidak cukup karena yang lebih penting adalah bagaimana praktik-praktik kebudayaan dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat setiap hari.

Ada empat nilai inti atau *core values* dari pendidikan multikultural, yaitu: a) apresiasi terhadap kenyataan pluralisme budaya dalam masyarakat; b) pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia; c) pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia; dan d) pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka dapat dirumuskan enam tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai inti tersebut, yaitu: *pertama*, mengembangkan perspektif sejarah (ethnohistorisitas) yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat; *kedua*, memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat; *ketiga*, memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat; *keempat*, membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka (*prejudice*); *kelima*, mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi; dan *keenam*, mengembangkan keterampilan aksi sosial (*social action*).

Diperlukan penjabaran dari konsep ini dalam berbagai jenis kegiatan, seperti: *pertama*, reformasi kurikulum, yaitu diperlukan suatu teori kurikulum yang baru antara lain berisi analisis historis yang termasuk di dalamnya analisis buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan pluralisme budaya. *Kedua*, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Juga diperlukan aksi-aksi budaya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya. *Ketiga*, mengembangkan kompetensi kultural. Hal ini meliputi pengembangan identitas etnis dan subetnis melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Demikian pula memberantas berbagai jenis prasangka yang buruk dan menjauhkan nilai-nilai negatif dari suatu kelompok etnis. *Keempat*, melaksanakan pedagogik persamaan hak. Pedagogik persamaan hak dilaksanakan di sekolah, misalnya dalam cara mengajar dan mengajar yang tidak menyinggung perasaan atau tradisi suatu kelompok tertentu. Demikian pula praktik-praktik dalam budaya sekolah yang membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Kehidupan sekolah yang sebenarnya adalah sebuah masyarakat mini, merupakan lahan yang tepat untuk menanamkan pendidikan multikultural. Pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah sangat ditentukan oleh pemikiran dan praktik warga sekolah, meliputi: kepala sekolah, guru, murid, dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, untuk membangun masyarakat yang mengakui dan menghargai perbedaan dari berbagai aspek baik budaya, suku, ras, gender, dan status sosial, diperlukan proses pendidikan yang bukan mengajarkan tentang multikultur tetapi juga membangun sikap dan mental masyarakat. Oleh sebab itu, perlu pemahaman dari seluruh warga masyarakat (masyarakat sekolah). Pemahaman ini yang kemudian menjadi modal dasar praktik/implementasi pendidikan multikultural melalui pembaruan pemahaman kepala sekolah, guru dan siswa tentang pendidikan multikultural; reformasi dalam kurikulum; proses pembelajaran; bentuk interaksi dalam kehidupan di sekolah; dan hendaknya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai multikultur dalam bentuk tindakan sehari-hari dalam institusi pendidikan.

Ada tiga tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu:

**a. Agama, suku bangsa, dan tradisi**

Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagaimanapun juga hal itu akan menjadi perusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Di dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama.

**b. Kepercayaan**

Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya risiko dari kecurigaan/ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat/plural.

### c. Toleransi

Toleransi merupakan bentuk tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi, tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural. Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu:

#### 1. Sarana alternatif pemecahan konflik

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diakui dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur sosial dan budaya. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial-budaya. Struktur kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, bukan sumber perpecahan. Saat ini pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri atas berbagai macam budaya. Pada kenyataannya pendidikan multikultural belum digunakan dalam proporsi yang benar. Maka, sekolah dan perguruan tinggi sebagai instirusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai dengan otonomi pendidikan atau sekolahnya sendiri. Model-model pembelajaran mengenai kebangsaan memang sudah ada. Namun, hal itu masih kurang untuk dapat menghargai perbedaan masing-masing suku, budaya maupun etnis. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai konflik dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal ini berarti bahwa pemahaman mengenai toleransi di masyarakat masih sangat kurang. Maka, penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri setiap peserta didik sikap saling toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Menurut Stephen Hill, pendidikan multikultural dikatakan berhasil apabila prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya multidimensi aspek kehidupan yang tercakup

dalam pendidikan multikultural. Perubahan yang diharapkan adalah pada terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan masyarakat, dan tidak selalu muncul konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan SARA.

2. Agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya

Selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga signifikan dalam upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang ia miliki sebelumnya, saat ia berhubungan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi. Pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi 'ancaman' serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas tersebut, peserta didik tersebut hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam. Sehingga peserta didik tersebut memiliki kemampuan global, termasuk kebudayaan. Dengan beragamnya kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyak budaya, agar siswa tidak melupakan asal budayanya. Menurut Fuad Hassan, saat ini diperlukan langkah antisipatif terhadap tantangan globalisasi, terutama dalam aspek kebudayaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dapat memperpendek jarak dan memudahkan adanya persentuhan antar budaya. Tantangan dalam dunia pendidikan kita, saat ini sangat berat dan kompleks. Maka, upaya untuk mengantisipasinya harus dengan serius dan disertai solusi konkret. Jika tidak ditanggapi dengan serius terutama dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab atas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka, peserta didik tersebut akan kehilangan arah dan melupakan asal budayanya sendiri. Sehingga dengan pendidikan multikultural itulah, diharapkan mampu membangun Indonesia yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, karena keanekaragaman budaya dan ras yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan.

3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional

Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting apabila dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu. Pengembangan kurikulum yang

berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku secara serentak seperti sekarang menjadi filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan.
- b) Harus merubah teori tentang konten (*curriculum content*) yang mengartikannya sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi, menuju pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan (*skills*) yang harus dimiliki generasi muda.
- c) Teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
- d) Proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Dengan cara tersebut, perbedaan antarindividu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa untuk hidup dengan keberanekaragaman budaya.
- e) Evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.

## **C. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural di Sekolah Pembauran Medan**

### **1. Profil Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda**

Penulis tidak memiliki banyak referensi tentang sekolah-sekolah yang secara eksplisit sebagai suatu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan multikultural. Eksplisit di sini yang dimaksud yaitu suatu sekolah yang memiliki kurikulum pendidikan multikultural. Pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

“Usaha sadar dan terencana” berarti ada upaya dari pihak sekolah untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan yang dimaksud. Jika suatu sekolah

bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan karakter, maka harus ada upaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Upaya dirumuskan mulai dari visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian. Begitu pula jika suatu sekolah mendeklarasikan sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan multikultural, maka sekolah tersebut juga harus memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian pendidikan multikultural. Penulis memberikan contoh praktik pendidikan multikultural di “Sekolah Pembauran” Medan, Sumatera Utara karena di sekolah ini jelas memiliki visi, misi, tujuan dan strategi untuk mewujudkan pendidikan multikultural. Berikut penulis uraikan pendidikan multikultural yang diselenggarakan di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda.

Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (disingkat YPSIM) sering dikenal juga sebagai “Sekolah Pembauran”, terletak di Jalan T. Amir Hamzah Pekan I Sunggal Medan Sunggal, 20128, Telp.061-8457702, e-mail: yanbun@yahoo.com. YPSIM menyelenggarakan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yayasan ini beroperasi sejak 25 Agustus 1987, sehingga sudah berumur 25 tahun pada tahun 2013.

Ketika berkunjung ke YPSIM, mata akan dibuat terbelalak dengan gedung sekolah yang keren, terutama gedung sekolah TK-nya. “*Wah, keren dan megah kali gedung TK-nya!*”, demikian komentar yang terlontar. Kompleks sekolah terletak di Gang Bakul, Pekan I Medan Sunggal. Gedung TK/Playgroup menjulang tinggi dan megah, serta desain arsitekturnya yang mirip dengan *Disneyland*. Untuk menyelesaikan pembangunan gedung berlantai dua itu membutuhkan waktu sekitar dua tahun pengerjaannya. Setiap ruangan belajar dilengkapi seperangkat meja kursi yang terbuat dari bahan palstik dengan bentuk yang lucu dan warna-warni yang menyolok. Demikian juga dengan warna untuk bangunan sisi luar gedung, dengan warna ungu dan biru.

Setiap ruangan juga dihiasi dengan gambar atau lukisan sesuai tema ruangan kelas. Misalnya ruangan kelas bertema Galaxy, maka dinding ruangan banyak dihiasi dengan gambar planet angkasa. Bangunan gedung untuk siswa SD dan SM menjadi gerbang untuk masuk ke kompleks sekolah. Gedung tersebut baru selesai direnovasi sejak September 2012 dan lantainya terbuat dari keramik. “Tahun 2018, Saya proyeksikan seluruh gedung sekolah di sini berlantai empat bahkan bisa sampai lima lantai”, ungkap dr. Sofyan Tan. dr. Sofyan Tan adalah pendiri YPSIM.

Rencana ke depan untuk melengkapi fasilitas di YPSIM telah dirancang sebuah gedung auditorium audio visual berkapasitas 400-500 orang. Menurut Sofyan Tan: “*Jadi di gedung ini, siswa kelak bisa menonton pemutaran film-film*

*umum yang mendidik, sekaligus memutar film-film yang mereka buat sendiri.”* Juga akan dibangun sebuah gedung serba guna. Gedung ini nantinya akan multifungsi. Dapat digunakan untuk tempat latihan bulu tangkis, tennis meja, senam, dan ruang ujian siswa. Pemfungsian ruang serba guna untuk tempat ujian menurut Sofyan Tan juga sekaligus untuk mendorong siswa agar mempersiapkan diri sebaik mungkin saat hendak mengikuti ujian. Menurutnya, siswa harus percaya pada kemampuan mereka sendiri.

Keistimewaan ruang serba guna ini untuk ruang ujian, menurut Sofyan Tan yaitu: *“Siswa yang ikut ujian akan dicampur dari berbagai tingkatan, sehingga seorang siswa SMA bisa saja sebelahnya, di depan, atau di belakangnya siswa SD atau SMP, atau SMK. Jadi tidak ada lagi peluang untuk bertindak curang.”* Ia tidak menginginkan siswa di sekolahnya mendapat nilai ujian tinggi, tapi nilai itu diperoleh dari tindakan tidak terpuji seperti nyontek atau dibantu orang lain. Sofyan Tan menegaskan bahwa: *“Kalau sejak remaja sudah dibiasakan untuk jujur, kalau sudah jadi pejabat atau pengusaha tidak akan menggunakan cara yang jujur juga. Saya inginkan lahir profil lulusan yang seperti itu dari sekolah ini.”*

Usaha YPSIM untuk mewujudkan tujuan pendidikan multikultural dilakukan melalui hal berikut:

**a. Lembaga Riset**

Lembaga ini dibentuk untuk melahirkan profil lulusan yang mampu berperan sebagai agen perubahan, YPSIM sudah menyiapkan strategi. Bersama putrinya, Tracey Hardjatanaya, yang master pendidikan lulusan Oxford University London , serta beberapa tenaga S2 lainnya telah menyiapkan sebuah unit yang secara khusus menangani berbagai kegiatan riset yang melibatkan siswa. *“Siswa yang punya minat melakukan penelitian dapat bergabung ke lembaga tersebut,”* ungkap Sofyan Tan. di lembaga itu, siswa dapat membuat berbagai usulan penelitian yang hasilnya diharapkan dapat memiliki nilai guna untuk masyarakat.

**b. Program Pengembangan Sumber Daya Guru**

Tidak hanya gedung-gedung sekolah dan fasilitas pendidikan yang terus digeber pembangunannya, pengembangan sumber daya guru juga memperoleh perhatian serius. Upaya berupa fasilitasi guru untuk studi lanjut ke jenjang lebih tinggi. Untuk itu sejumlah guru muda yang berusia antara 20 sampai 30 tahun tengah diamati dan dipantau untuk dicalonkan untuk menerima beasiswa studi lanjut ke jenjang S2. Sejumlah guru berprestasi

juga dikirim mengikuti studi banding, baik ke Jakarta ataupun ke negara jiran seperti Malaysia atau Singapura.

### c. Klinik Konsultasi Psikologi

Perkembangan siswa pun tidak luput dari perhatian yayasan. Menurut Sofyan Tan, berdasarkan hasil evaluasi dengan para kepala sekolah, juga dari hasil observasi, beberapa siswa memiliki problem prestasi dalam belajar. Penyebabnya bukan karena malas belajar, atau sering bolos sekolah. Tapi dampak kisruh yang terjadi dalam rumah tangga siswa. Misalnya ada hubungan yang tak harmonis diantara orangtua. Menurut siswa: "*Ayah ibu sering bertengkar...*". Hal ini berdampak pada turunnya prestasi siswa. Ini perlu mendapat terapis psikologis agar siswa mampu mengatasi masalahnya dan prestasinya kembali membaik.

Klinik psikologi dikelola oleh seorang psikolog profesional. Guru BP memang ada di YPSIM, namun menurut Sofyan Tan, jumlah siswa yang terus meningkat, kurang sebanding dengan dinamika masalah yang muncul di kalangan siswa.

### d. Klinik Sekolah-Rotary Club

YPSIM juga dilengkapi dengan Klinik Sekolah. Klinik ini terletak di sisi depan bagian kompleks sekolah. Bagi siswa yang tengah merasa kurang enak badan saat belajar di sekolah, tentu saja klinik ini menjadi tempat rujukan pertama agar siswa memperoleh penanganan medis yang maksimal. Menurut Nuraini (46), paramedis yang sehari-hari bertugas di klinik sekolah: "*Rata-rata tiap hari jumlah siswa yang berobat berjumlah 8-10 orang*". Namun, tidak hanya siswa yang berobat, juga guru, karyawan serta masyarakat umum yang tinggal di sekitar Sunggal.

Pasien yang berobat ke klinik memang tidak dipungut biaya. Obat juga diberikan secara gratis, bahkan sampai si pasien sembuh. Biasanya dalam jangka waktu sampai 6 bulan. Namun untuk beberapa penyakit berat atau pemeriksaan medis yang butuh peralatan khusus, dan peralatan tersebut tidak terdapat di klinik sekolah, maka pasien harus berobat sendiri ke klinik yang dirujuk.

Nuraini memberi contoh pasien yang hendak melakukan rontgen untuk memeriksakan paru-paru atau kepala, namun ada catatan, jika si pasien tak mampu secara ekonomi, pihak klinik akan mengalihkan penanganan pasien ke Rotary Club. Itu artinya seluruh biaya pengobatan pasien ditanggung pihak Rotary Club. Ditambahkan Nuraini warga Sunggal sangat terbantu

dengan keberadaan klinik sekolah Rotary itu. Hampir tiap hari klinik sekolah itu tidak pernah sepi dari pasien yang datang untuk berobat. Keluhan pun beragam. Mulai dari yang terserang flu, batuk, sakit gigi, sampai yang datang untuk memeriksakan kadar gula darah, darah tinggi, atau kolesterol mereka.

Menurut drg. Fatmawati (29), alumni Fakultas kedokteran Gigi USU Medan, yang bertugas setiap hari Kamis dan Sabtu, keluhan para pasien yang berobat gigi umumnya karena gigi mereka berlubang atau gigi mereka bengkak. Ia mengatakan: *“Kalau pasiennya siswa TK atau SD, umumnya karena gigi mereka berlubang.”* Penyebab gigi berlubang menurutnya karena cara menyikat gigi yang salah, misalnya kemiringan sikat gigi tidak sampai 45 derajat sehingga masih banyak sisa makanan yang tertinggal di selang-sela ujung gigi. Bisa juga karena kebiasaan malas berkumur setelah selesai makan. Karena itu orangtua menurut drg. Elizabeth harus rajin memperhatikan kebersihan gigi anaknya.

Sementara dr. Elizabeth (25), alumni Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia mengatakan bahwa pasien yang datang berobat kepadanya umumnya banyak terserang ISPA atau gangguan pernapasan. Namun ada juga yang cukup serius. Balum lama misalnya ada siswa yang kena tumor jinak di tangan (lipoma), dan harus segera dioperasi. Siswa tersebut kemudian diambil alih Rotary Club yang kemudian merujuk ke rumah sakit yang lain untuk mengoperasinya. Juga ada seorang pegawai yang mengalami gangguan fungsi hati, yang jika tidak segera dioperasi bisa mengakibatkan hepatitis. *“Kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk dioperasi, biayanya ditanggung oleh pihak sekolah dan rotary Club,”* demikian ungkap dr. Elizabeth. Begitulah, keberadaan klinik sekolah yang dikerjasamakan dengan Rotary Club Medan itu memang ibarat lilin yang mampu memberi sinar terang tak hanya siswa dan pegawai sekolah, tetapi warga tunggal yang papa.

#### e. **Keamanan dan Kebersihan Sekolah**

Dalam rangka menjaga kenyamanan warga sekolah, YPSIM juga memfasilitasi dengan Satuan Petugas Keamanan (Satpam). Sekolah ini memiliki empat orang Satpam. Sebagai kepala Satpam yakni Sukirman. Menurut Sukirman: *“Satpam sekolah harus kenal dengan orangtua atau orang yang menjemput anak mereka, khususnya jika yang dijemput anak TK dan SD.”*

Mengoordinir empat orang satpam, ditambah empat tenaga kebersihan yang diperbantukan untuk mengawasi siswa, Sukirman menyebut ada

sejumlah juknis yang wajib dipatuhi satpam agar menumbuhkan rasa aman siswa di sekolah, yakni:

*“Selama menjalankan tugas satpam dilarang ngobrol dengan orang yang tak dikenal. Sekedar ‘say hello’, oke-oke saja. Tapi kalau terlalu lama mengobrol, pasti akan kena tegur. Kalau asyik ngobrol, satpam jadi lalai dengan keamanan, orang yang punya niat jahat punya kesempatan untuk melakukan aksinya.”*

Sukirman yang pernah mendapat penataran di Poltabes Medan itu, juga mendaskan bahwa satpam di sekolah SIM diwajibkan untuk mengenal wajah orangtua atau orang yang menjemput anak mereka. Apalagi jika itu anak TK atau SD. Ia menambahkan: *“Kalau tukang besak yang jemput tidak dikenal satpam, maka identitas si tukang becak akan kita catat, dan izin membawa pulang anak harus ada dari Kepala TK.”* Semua prosedur itu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk mencegah dan memantau siswa berantem, terutama saat istirahat, para satpam sekolah mendapat bantuan empat orang tenaga kebersihan yang aktif keliling di beberapa tempat bermain siswa. Keamanan sekolah juga dijaga sampai malam hari. Dua orang satpam setiap satu jam bergiliran mengadakan patroli keliling sekolah. Tak heran dengan tugas yang cukup berat itu, keempat orang satpam sekolah itu menurut Sukirman telah dibekali ilmu bela diri untuk menunjang tugas mereka. Sukirman yang sudah menjadi petugas keamanan selama sepuluh tahun itu mengatakan: *“Mereka semua harus bisa karate, ya untuk jaga-jaga jika suatu saat mereka harus berhadapan dengan orang yang hendak berbuat jahat.”*

## **2. Tingkat Satuan Pendidikan Di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM)**

YPSIM merupakan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah, dari Playgroup/TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Keistimewaan YPSIM adalah fokus penyelenggaraan pendidikannya yang menerapkan Pendidikan Multikultural. Profil masing-masing tingkat satuan pendidikan yakni sebagai berikut:

### **a. Playgroup-Taman Kanak-Kanak SIM**

TK Sultan Iskandar Muda selalu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak didik dalam lingkungan yang nyaman dan aman. Pengelola yakin

bahwa anak-anak memiliki pribadi yang unik, yang memiliki hasrat terdalam untuk melakukan yang terbaik. Oleh karenanya, alam lingkungan sekolah dirancang sedemikian rupa sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk bersinar, menjadi kreatif, imajinatif dan mandiri dan membuat keputusan sendiri serta membuat anak-anak betah di dalamnya.

Guru-guru yang mengajar di tingkat ini merupakan orang-orang yang sudah terlatih, mengerti pendidikan anak usia dini, bertalenta dalam setiap aktivitas dan memiliki kreativitas masing-masing serta merancang pembelajaran yang membuat anak-anak merasa nyaman dan enjoy selama proses belajar mengajar berlangsung. Mereka menyakinkan bahwa anak-anak yang di sekolahkan di TK SIM berada di tangan yang tepat.

Kurikulum terbaru diajarkan, interaktif sesuai dengan tingkat perkembangan anak, menyenangkan, kreatif, bermakna bagi anak, dan semua dikembangkan berdasarkan pendidikan multikultural. Visi TK SIM yakni: “Mengembangkan kepribadian anak yang cerdas, kreatif, bermoral dan berdisiplin yang berciri khas Pendidikan Multikultural.

Misi TK SIM yakni: Mendidik dan membimbing anak dalam perkembangan daya pikir, tingkah laku dan berbudi pekerti; Melatih dan mengembangkan potensi diri anak didik; Menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan; Membiasakan anak didik untuk menghargai dan menghormati perbedaan SARA; Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antar guru dan orangtua; dan Meningkatkan kompetensi guru melalui workshop dan pelatihan. Fasilitas yang dimiliki di TK SIM diantaranya:

1) Ruang Kelas yang Nyaman

Kelas yang nyaman dengan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mereka belajar sambil bermain dan menunjukkan kreativitas mereka masing-masing. Mereka memiliki kelas dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan nama kelas. Setiap kelas didekor sesuai dengan tema (nama kelas) oleh guru kelas yang memiliki kreativitas masing-masing.

2) Perpustakaan

Selain memperkenalkan fungsi dari perpustakaan, juga membantu anak didik untuk meningkatkan budaya membaca. Di perpustakaan yang FULL AC sehingga membuat ruangan perpustakaan dingin dan sejuk sehingga anak-anak dapat membaca sambil belajar dengan suasana yang nyaman.

3) Ruang Bermain Indoor

Tempat bermain dalam ruangan yang dingin dan sejuk disediakan sebagai tempat bermain untuk anak didik. Tempat dimana anak bermain dengan teman-temannya, berbagi kebersamaan dan membangun persahabatan.

4) Ruang Komputer

Ruang komputer yang FULL AC sehingga membuat anak-anak merasa nyaman saat mereka bermain sambil belajar di dalamnya.

TK SIM juga memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan bakat non-akademik mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diantaranya, seperti: berenang, musik angklung, *modern dance* dan tarian tradisional, bernyanyi, lab. Komputer, serta mewarnai dan melukis. Prestasi yang diukir TK SIM juga tidak mengherankan, seperti: juara II lomba menyusun balok di Kantor Lurah Sunggal; juara III lomba mewarnai di Lapangan Futsal Sunggal (Honda Beat); juara harapan I di Auto 200 Ringroad; juara I lomba mewarnai di McDonald; juara I, III lomba mewarnai PORSENI MILLENIUM (Ajang Kreativitas); juara II lomba menyanyi di Planet Kids IDO; juara harapan I lomba menyanyi di PLANET KIS IDOL; dan juara harapan I Cerdas Cermat PORSENI TK Kec. Medan-Sunggal.

**b. Sekolah Dasar Sultan Iskandar Muda (SD SIM)**

SD SIM menawarkan pendidikan seutuhnya, dimana bukan kecerdasan intelektual saja yang diprioritaskan tetapi segenap keluarga besar SD SIM selalu berusaha menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam konsep multikultural, dengan menyeimbangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam membangun skhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, segenap pengurus sekolah membutuhkan kerjasama dari masyarakat khususnya orangtua siswa untuk dapat bekerja dalam mewujudkan apa yang orangtua dan guru harapkan terhadap anak didik. Pendidikan dasar merupakan fondasi awal bagi peserta didik khususnya kelas I SD dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka dalam hal membaca, menulis, dan berhitung.

Tenaga pendidik di SD SIM secara keseluruhan berasal dari lulusan Sarjana di bidangnya masing-masing dan hampir 50 persen telah

mendapatkan Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Khusus di tingkat kelas 1 (satu) selain dibimbing oleh guru bidang studi peserta didik juga dibimbing oleh guru pendamping (asisten guru) yang berada di dalam kelas.

Lingkungan belajar dikondisikan seperti pada saat mereka berada di Taman Kanak-Kanak tetapi mulai diarahkan untuk lebih mandiri lagi dalam hal menyelesaikan segala tugas dan kewajiban selayaknya siswa SD. Di samping itu pendidikan moral dan etika tetap menjadi prioritas utama selain meningkatkan kemampuan intelektual. Akreditasi sekolah terkadang juga menjadi tolok ukur bagi sekolah dan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik dan rangkaian kegiatan pembelajaran sampai dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran.

Setiap tahunnya SD SIM selalu membenahi diri dalam hal peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam pembelajaran. Pada tahun pelajaran 2012/2013, SD SIM dilakukan penilaian Akreditasi Sekolah meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan yang dilaksanakan oleh BAN-SM Provinsi Sumatera Utara, dan SD SIM memperoleh jenjang Akreditasi A (Amat Baik) dengan perolehan nilai 91.

SD SIM juga memberikan kegiatan ekstrakurikuler seperti: vokal, melukis, lab. Bahasa Inggris, lab. Komputer, angklung, dan club olimpiade. Selain itu, dalam kurikulum di SD SIM memberikan muatan lokal berupa: bahasa Mandari, Sempoa, dan Bahasa Inggris. Siswa-siswa di SD SIM juga mengukir beberapa prestasi, diantaranya yaitu: juara III lomba menggambar 'Hari Anak Dunia' tahun 2012, juara I lomba Sempoa tingkat Nasional 2012, dan lain sebagainya.

### c. **SMP Sultan Iskandar Muda (SMP SIM)**

SMP SIM merupakan suatu lembaga pendidikan yang selalu memperhatikan kebutuhan utama anak didiknya dalam penerapan sistem pendidikan. Sekolah ini menerapkan model pendidikan multikultural dalam pembelajaran sehari-hari yang merupakan ciri khas dari pendidikan di Sultan Iskandar Muda. Anak didik diberi kesempatan untuk menunjukkan kreativitasnya, menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab serta berprestasi dalam berbagai bidang studi akademis maupun non-akademis.

SMP SIM terletak di kompleks YPSIM. Mengingat sekolah ini berada dalam lingkungan masyarakat yang sangat mejemuk sehingga model pendidikan multikultural adalah acuan yang paling tepat, karena dapat

menjawab problema pendidikan untuk memberikan hak yang sama kepada semua anak untuk bersekolah di SMP SIM sekalipun berbeda suku bangsa, agama, ras, dan tingkat ekonomi yang bervariasi.

Untuk menunjang tujuan Pendidikan Nasional dan tercapainya visi dan misi SMP SIM harus didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan fasilitas yang dapat memperlancar proses pendidikan. Pihak sekolah memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai seminar dan pelatihan, antara lain: mengadakan seminar pendidikan multikultural; pelatihan Bahasa Inggris; pelatihan menulis; membentuk MGMP untuk semua bidang studi; mengundang narasumber untuk pencerahan; dan mengikuti seminar yang diadakan oleh dinas pendidikan dan lembaga lain yang berhubungan dengan pendidikan.

Yayasan juga memotivasi semua guru untuk berprestasi dan juga sebagai rewardnya bagi guru yang berprestasi diberi tunjangan, khusus untuk tahun 2011 dan 2012 diberi kesempatan untuk studi banding ke Penang tepatnya tanggal 9 sampai dengan 12 Maret 2013. Yayasan juga membangun rumah ibadah berupa: Masjid, Gereja, Vihara. Sementara Kuil akan dibangun kemudian sebagai aplikasi dari teori ke praktik langsung. Guna meningkatkan kemampuan siswa, pihak sekolah melakukan berbagai upaya, diantaranya: membentuk English Club, Sains Club, Club of Art, dan Club Olahraga; mengadakan kunjungan ke PPLH Bukit Lawang, Peternakan Sapi di Berastagi, dan Perkebunan Teh.

Hal tersebut memungkinkan, baik guru maupun siswa SMP SIM dapat memberikan prestasi, diantaranya: juara II 50 meter gaya bebas putri belajar non-klub Tingkat SMP pada kejuaraan renang antar pelajar ISTP Cup; juara I melukis tingkat SMP; juara II Gerak Jalan beregu; juara I renang putri; juara olimpiade sains 2008-2009; dan sebagainya.

#### **d. SMA Sultan Iskandar Muda (SMA SIM)**

SMA SIM juga berada dalam kompleks gedung YPSIM. Sekolah ini memiliki visi, yakni: “Menjadi sekolah yang unggul dalam IPTEK dan mendukung keberagaman dalam suasana kebersamaan”. Misinya yakni:

*“Menciptakan suasana belajar yang aman, harmonis, dan kondusif;  
Meningkatkan kinerja para guru, staf dan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimilikinya; Mewujudkan nilai-nilai pendidikan dalam bentuk siswa/siswi yang beriman, bertaqwa dan produktif;  
Membekali peserta didik dengan keterampilan bidang seni dan*

*olahraga; Menumbuhkan jiwa persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosial ekonomi serta jenis kelamin; Menjadikan lulusannya mempunyai life skill untuk dapat diterima di dunia kerja; Menumbuhkan kerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan kualitas dan kuantitas siswa; Menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa secara optimal terhadap lingkungan sekolah dan sekitarnya; Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi; dan Menjadikan siswa yang memiliki dedikasi, disiplin, jujur, inovatif, tekun dan ulet sebagai wujud pengembangan SDM yang unggul.”*

Dalam KBM di kelas guru mengacu pada *student centered*. Guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa yang aktif untuk menemukan penyelesaian dalam pembelajaran. Untuk membuktikan teori yang ada kegiatan praktikum menjadi salah satu program yang harus dilaksanakan guru, di samping memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar misalnya kegiatan outdoor, kunjungan ke museum, kebun botani, dan lain-lain.

Kegiatan ekstrakurikuler juga dikembangkan di SMA SIM, diantaranya: olahraga (basket, futsal, anggar, dan bulutangkis); bidang seni (cheerleaders, modern dance, lipsink, teater, bina vokal, band, sulap, dan melukis); bidang publikasi (Simpul Siswa, Penyiar Radio); bidang Klub Sains (matematika, kimia, fisika, biologi, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, biologi); dan bidang organisasi (OSIS, PMR, Pramuka).

Guna meningkatkan budaya kompetitif di kalangan siswa khususnya di Kota medan setiap tahunnya diadakan beberapa kegiatan, antara lain: Pesona Pendidikan (lomba sains, lomba seni) yang diadakan sejak tahun 2009; Turnamen Futsal SMA SIM yang dilaksanakan sejak tahun 2010; dan Mengadakan Tryout gratis untuk kelas IX SMP.

Untuk mengembangkan minat dan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, maka siswa sejak kelas X dilakukan kuisioner untuk mengetahui cita-cita mereka. Sekolah kemudian melakukan kegiatan, diantaranya: mengundang narasumber sebagai motivator, mengundang alumni sesuai jurusan yang dipilih sehingga sebelum siswa tamat SMA, mereka telah memiliki informasi awal tentang jurusan yang mereka pilih; Mengadakan kegiatan wawancara dengan pihak akademisi terutama menyangkut program beasiswa kuliah di luar negeri. Kegiatan ini

dilakukan dengan menggunakan media *Skype* atau *Google Hangout*; dan Mengadakan *outbond training*.

Seiring dengan berjalannya waktu disertai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA SIM, sejumlah p diraih baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun lulusannya yang banyak diterima di PTN favorit. Sejak tahun 2008-2012 kelas XII lulus 100% pada UN dan US dengan kualifikasi: A. lulusannya banyak diterima di PTN favorit seperti USU, UNPAD, UNSRI, UNRI, dan UNIMED. Tahun 2011 yang diterima di PTN berjumlah 42 orang, dan tahun 2012 berjumlah 40 orang. Dalam bidang ekstrakurikuler juga tidak ketinggalan prestasi yang diukir oleh SMA SIM, diantaranya: juara dalam bidang olimpiade, bidang pidato dan presenter, bidang olahraga, dan bidang seni.

### 3. Perwujudan Pendidikan Multikultural Melalui Kultur Sekolah dan Kelas

Kultur sekolah merupakan refleksi dari filsafat yang dianut oleh sebuah sekolah. Dengan menciptakan kultur sekolah yang sistematis dan sesuai dengan landasan dan arah pendidikan yang ingin dicapai, visi dan misi sebuah sekolah lebih mudah diserap dan mudah untuk terealisasi. Layaknya kebudayaan yang dipelajari di dalam keluarga dan masyarakat, budaya sekolah dapat lebih mudah diserap dan menjadi bagian identitas dan karakter individu yang ada di dalamnya jika diekspos secara jelas dan terus menerus.

Sekolah SIM dalam mengimplementasikan teori dan konsep pendidikan multikultural menggunakan pendekatan yang disebut '*Whole School Approach*'.



Gambar 5. 5. A Whole School Approach (Raihani, 2011: 30)

Pendekatan dalam diagram di atas merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah SIM.

**a) *School Vision and Policies (Visi dan Kebijakan Sekolah)***

Visi sekolah merupakan elemen paling penting dalam menentukan suksesnya pendidikan toleransi di sekolah. Visi sekolah YPSIM masih sama, yakni “mendidik generasi muda Indonesia menjadi manusia yang cerdas, religius, humanis dalam bingkai kesetaraan dan keberagaman”. Adapun misi yang dilakukan oleh YPSIM dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat play group, TK, SD, SMP, SMA/SMK berdasarkan kurikulum nasional yang berlaku dengan muatan khusus berbasis budaya, karakter, dan kewirausahaan;
2. Menyelenggarakan program anak asuh silang dan berantai, untuk memberdayakan generasi muda dari beragam suku yang secara ekonomi berkekurangan agar bisa melakukan mobilitas sosial;
3. Menyelenggarakan pendidikan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk mempererat kerjasama, membangun kebersamaan, serta mengikis cara berpikir yang penuh muatan prasangka kesukuan dan kebencian rasial;
4. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama sesuai kepercayaan yang dianutnya.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, beberapa kebijakan sekolah utama yang menjadi landasan absolut pelaksanaan pendidikan multikultural di YPSIM yang berlaku bagi semua warga sekolah, yaitu:

- a. Tidak ada anak yang boleh dikeluarkan dari sekolah karena tidak sanggup membayar uang sekolah.
- b. Guru yang menjelek-jelekkan agama manapun ataupun guru yang memaksakan suatu agama kepada para peserta didik akan dikeluarkan dari sekolah.
- c. Murid yang melakukan diskriminasi, baik verbal maupun fisik terhadap temannya, gurunya atau warga sekolah lainnya akan dikenakan sanksi yang berat.

**b) *Leadership and Management (Kepemimpinan dan Manajemen)***

Berhubungan dengan pendidikan toleransi, ia mengatakan pentingnya semangat dari para pemimpin sekolah dalam mempromosikan

nilai-nilai saling menghargai, kesetaraan dan keadilan sosial di sekolah. Multikulturalisme tidak dapat diimplementasikan dengan baik tanpa adanya penerapan gaya kepemimpinan yang cocok. Di YPSIM, beberapa kegiatan untuk melatih kepemimpinan dan mengembangkan hubungan baik antar guru juga dilakukan, diantaranya: Pengayaan dan Pelatihan berkala; Liburan bersama dan *Outbound*; Silaturahmi; Evaluasi reguler.

c) ***Capacity and Culture (Kapasitas dan Kultur/Kebudayaan)***

Dalam praktiknya, pembentukan setiap elemen budaya sekolah ini dilakukan melalui upaya yang terencana dan sadar, dan ini dapat terjadi di sekolah melalui pembentukan norma-norma dan nilai, artikulasi filsafat, penciptaan simbol, upacara, ritual, dan interaksi orang tua dan masyarakat. Upaya yang terencana dan sadar ini penting adanya untuk mencegah terjadinya pertentangan antara simbol yang satu dengan simbol lainnya serta benturan antara nilai-nilai yang sudah dibangun.

Secara umum, budaya yang ada di dalam lingkungan sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua: kultur sekolah dan kultur kelas. Namun, ini bukan berarti bahwa budaya sekolah dan budaya kelas itu terjadi secara terpisah- melainkan kedua budaya ini beserta budaya yang berada di luar sekolah, semuanya juga berinteraksi dan berjalan secara bersamaan, saling mempengaruhi satu sama lain.

1. Kultur sekolah

Kultur sekolah merupakan refleksi dari filsafat yang dianut oleh sebuah sekolah. Dengan menciptakan kultur sekolah yang sistematis dan sesuai dengan landasan dan arah pendidikan yang ingin dicapai, visi dan misi sebuah sekolah lebih mudah diserap dan mudah untuk terealisasi. Layaknya kebudayaan yang dipelajari di dalam keluarga dan masyarakat, kultur sekolah dapat lebih mudah diserap dan menjadi bagian identitas dan karakter individu yang ada di dalamnya jika diekspos secara jelas dan terus menerus.

Kultur sekolah yang dibentuk oleh nilai-nilai multikulturalisme pun dapat direalisasikan melalui beberapa hal di bawah ini: Penyediaan rumah ibadah dan pendopo yang terletak di kawasan sekolah (Dalam pelajaran IPS sering terdengar kata-kata '*saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda*'); Perayaan hari-hari besar agama dan Malam Bhinneka Tunggal Ika; Monumen sekolah yang menjadi representasi visi sekolah: Pohon Bisbul dan Rumah Tawon.

## 2. Kultur kelas

- a. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum pelajaran pertama dimulai dan se usai pelajaran terakhir.
- b. Pengaturan tempat duduk untuk interaksi dan pertukaran budaya yang optimal.

### d) *Student Activities (Aktivitas Peserta Didik)*

Selain kegiatan formal di dalam kelas, kegiatan siswa, mulai dari kegiatan intra-kurikuler dan ekstra-kurikuler juga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga ajaran toleransi dan nilai-nilai terkait lainnya dapat juga dikembangkan dengan baik di luar kegiatan formal, seperti: Klub olahraga, seni, musik, sains dan bahasa; Radio keberagaman; Simpul siswa; Kegiatan keagamaan: pesantren kilat, retreat, dll.; Seminar dan workshop.

### e) *Collaboration with Wider Community (Kolaborasi dengan Masyarakat Luas)*

Di Indonesia, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses sekolah pada umumnya memang terlihat masih lemah jika dibandingkan dengan di negara-negara lain, tetapi persentasenya dirasakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak desentralisasi pendidikan yang terjadi pada tahun 1999, pemerintah telah mulai bekerja pada pendidikan berbasis komunitas; Program Anak Asuh Silang dan Subsidi Berantai; Bantuan sosial.

### f) *Curriculum and Teaching (Kurikulum dan Pengajaran)*

Kurikulum merupakan pedoman dari pendidikan formal, terutama pendidikan yang berlangsung di dalam kelas. Maka, reformasi materi dalam kurikulum formal itu penting. Tetapi juga harus diintegrasikan ke pelajaran matematika, bahasa Inggris dan materi pelajaran pendukung lainnya. Hal ini juga nampak dalam kurikulum 2013, termasuk mata pelajaran IPS yang memang seharusnya terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Aly, A. (2011). *Pendidikan Islam multikultural di pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banks, J. A. (1997). *Teaching strategies for ethnic studies*. (6<sup>th</sup> ed). Boston: Allyn and Bacon.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Educating citizens in a multicultural society*. (2<sup>nd</sup> ed). New York: Teachers College Press.
- Banks, J. A. & Banks., McGee, C. A. (2005). *Multicultural education: issues and perspectives*. New York: John Wiley & Son, Inc.
- Baron, S., Field, J., & Schuller, T. (2000). *Social capital: critical perspectives*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Risakotta, B. A. (2001). Pendidikan kritis yang membebaskan. *Basis*: Nomor 01-02, Tahun Ke-50, Januari-Februari 2001. Hlm: 037-045.
- Setiawan, B. (2008). *Agenda pendidikan nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Brown, L. M. (1970). *Aims of education*. New York: Teachers College.
- Mahfud, C. (2008). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cumming-Mc-Cann, A. (2003). Multicultural education connecting theory to practise. *Focus on Basic*. Volume 6, Issue B. February 2003.
- Ekosusilo, M. *Dasar-dasar pendidikan*. Semarang: Effhar Offset Semarang.
- Hanum, F. (April 2009). *Rintisan implementasi di sekolah dalam membangun perilaku bangsa (Pidato Pengukuhan Guru Besar, 20 April 2009)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hanum, F. & Rahardja, S. (2010). Implementasi Model Pembelajaran Multikultural Di Sekolah Dasar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*. Volume 3 Nomor 1, Maret 2010.
- Fatwa, A. M. (2001). *Demokrasi teistis: upaya merangkai integrasi politik dan agama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Hadi, F. Paradigma Pendidikan Multikultural Pesantren. (2008). *Jurnal Penelitian STAIN Kudus*. Vol. 2, No. 1. Januari-Juni 2008. Diunduh dari: [http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2108237242\\_1693-6019.pdf](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/2108237242_1693-6019.pdf). Pada hari, Sabtu, 11 Februari 2012. Pukul. 14. 25.
- Hasan, F. (2004). *Pendidikan manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Glasser, W. (1992). *The quality school: managing student without coercion*. New York: HarperColling Publisher, Inc.
- Ladson-Billings, G. & Gillborn, D. (2004). *The RoutledgeFalmer Reader in multicultural education*. London & New York: RoutledgeFalmer.
- Gollnick, D. M., & Chinn, P. C. (2006). *Multicultural education in a pluralistic society*. New York: Pearson Prentice Hall.
- Gorski, P. C. (2008). *Beyond celebrating diversity: exploring the multicultural curriculum*. Tp.
- Griffin, M. & Batten, M. (1991). *Equity in school: an independent perspective*. Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Groome, T. H. (2010). *Christian religious education*. Alih Bahasa: Daniel Stefanus. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gutek, G. E. (1974). *Philosophical alternatives in education*. New York: Charles E. Merrill Publishing Company, A Bell & Howell Company, Columbus, Ohio.
- Hammond, L. D., French, J. & Lopez, G., Paloma, S. (2002). *Learning to teach for social justice*. New York: Teachers College Press, Columbia University.
- Sunaryo, H. (2010). Pembelajaran Sastra Kreatif Produktif Dalam Konteks multikultural Bagi Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi Di SMP Kota Malang. ISSN 1412-565X. Diunduh dari: <http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/1091>, pada hari Sabtu 11 Februari 2012, Pada Pukul: 14.20.
- Barnadib, I. (1976). *Filsafat pendidikan: sistem dan metode*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Johnson, A. P. (2010). *Making connections in elementary and middle school social studies*. London: SAGE Publications. Inc.
- Karabel, J & Halsey, A. H. (Editor). (1979). *Power and ideology*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Ketchum, R. M. (ED). (2004). *Demokrasi: sebuah pengantar*. Terj. Yogyakarta: Niagara.
- Dewantara, K. H. (1994). *Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.

- \_\_\_\_\_. (1981). *Tamansiswa 30 tahun*. Yogyakarta: Percetakan Tamansiswa.
- Reksohadiprodjo, K. M. S. (1989). *Masalah pendidikan nasional: beberapa sumbangan pemikiran*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pokok-pokok ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (1985). *Persepsi masyarakat tentang kebudayaan (kumpulan karangan, editor: Alfian)*. Jakarta: Gramedia.
- Marri, A. R. (2005). *Building a framework for classroom-based multicultural democratic education: learning from three skilled teachers*. New York: Teachers College Record.
- Ahmad, N. S. (2011). *Pendidikan dan masyarakat*. Yogyakarta: Sabda Media.
- Nieto, S. (1992). *Affirming diversity: the sociopolitical context of multicultural education*. White Plains, N.Y.: Longman.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Affirming diversity: the sociopolitical context of multicultural education*. (4<sup>th</sup> ed). Boston: Pearson.
- Nieto, S., & Bode, P. (2008). *Affirming diversity: the sociopolitical context of multicultural education*. (5<sup>th</sup> ed). Boston: Pearson.
- Noel, J. (2000). *Notable selection in multicultural education*. New York: Dushkin. McGraw-Hill.
- Palmer, J. A. (2003). *50 Pemikir pendidikan: dari Piaget sampai masa sekarang, terj.* Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Fifty major thinkers on education: from Confucius to Dewey*. New York: Routledge.
- Parekh, B. (2008). *Rethinking multiculturalism: keberagaman budaya dan teori politik*. (Terjemahan: Rethinking multiculturalism: cultural diversity and political theory). New York: Palgrave Macmillan. (Buku asli diterbitkan tahun 2008).
- Suparlan, P. (2004). *Masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan minoritas: memperjuangkan hak-hak minoritas*. Dipresentasikan dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam *Landscape* Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004, 14.00-17.00 bbw. [http://interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat\\_majemuk.html](http://interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html), Diunduh pada hari Senin, 6 Februari 2012, pukul: 13. 05 bbw.
- Suparno, P. (2001). Relevansi dan reorientasi pendidikan di Indonesia. *Basis*. Nomor 01-02, Hlm: 020-027. Tahun Ke-50, Januari-Februari 2001.

- Peursen, C. A. (1976). *Strategi kebudayaan*. Terjemahan: Dick Hartoko. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Prayitno. (2011). *Panduan kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rahyono. (2009). *Kearifan budaya dalam kata*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Mulyadihardjo, R. (2010). *Filsafat ilmu pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Pendidikan Indonesia: harapan, visi, dan strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salahudin, A. (2011). *Filsafat pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Siswoyo, D. (2013). *Ilmu pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Swasono, S. E. (2012). *Menemukan kembali Republik Indonesia: revitalisasi pendidikan IPS dalam pembangunan karakter bangsa*. Makalah diajukan untuk seminar pembangunan karakter bangsa, HISPISI & Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 15 Januari 2012.
- Supardan, D. (2008). *Pengantar ilmu sosial: sebuah kajian pendekatan struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarno. (2008). *Pendidikan multikultural*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Sutikno, S. (2006). *Pendidikan sekarang dan pendidikan masa depan*. NTB: NTP Press.
- Al Muchtar, S. (2007). *Ilmu dan aplikasi pendidikan*. Artikel dalam TPIP FIP-UPI. Bandung: IMITIMA.
- Tiedt, P. L. & Tiedt, I. M. (2010). *Multicultural teaching: a handbook of activities information and resources*. Boston: Allyn and Bacon.
- Tilaar, H.A.R. & Riant Nugroho. (2009). *Kebijakan Pendidikan; pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: manajemen pendidikan dalam pusaran kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mangunwijaya, Y. B. (1998). *Menuju republik Indonesia serikat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zamroni. (2011a). *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2011b). *Research on multicultural education: a reader*. Graduate Programme UNY. (Diktat untuk Mata Kuliah Pendidikan Multikultural Program Pascasarjana UNY).

- \_\_\_\_\_. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Paradigma Pendidikan masa depan*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Pendidikan untuk demokrasi tantangan menuju civil society*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.





# Konsep dan Praksis **PENDIDIKAN** MULTIKULTURAL

Kondisi masyarakat yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Di Indonesia, wacana tentang pendidikan multikultural menjadi penting untuk membekali peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya.

Pendidikan multikultural yang diterapkan di sekolah akan membantu siswa untuk memahami, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda-beda identitas sosialnya. Pendidik memiliki tanggung jawab mengembangkan murid untuk dapat hidup di masyarakat. Dalam implementasinya diperlukan pendidikan yang mengajarkan siswa menguasai keterampilan pokok yang digunakannya menjadi agen-agen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Oleh karenanya, pendidikan dalam keberagaman dan masyarakat demokratis harus menjadikan siswa menguasai materi, sikap, dan keterampilan guna memahami secara reflektif, peduli, dan bertindak bijaksana.



ISBN : 978-602-4981-32-7



9 786024 981327

## UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY  
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 - 589346

E-Mail: [unypress.yogyakarta@gmail.com](mailto:unypress.yogyakarta@gmail.com)

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)